

**ANALISIS LITERASI KEUANGAN DAN PROMOSI LPMUKP DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDIT OLEH PARA NELAYAN DI
DESA PANGALASIANG KECAMATAN SOJOL KABUPATEN
DONGGALA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Skripsi Pada
Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu

Oleh :

UMI YANI

NIM : 195150089

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

2023

BIOGRAFI PENULIS



A. IDENTITAS DIRI

Nama : umi yani
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat /tgl Lahir : ponggerang 23 juni 2001
Nim : 195150089
Alamat : jl. Padanjakaya
No hp : 082250223644
Email : umiyani2306@gmail.com

B. Nama orang tua

Ayah : Ahmad.k
Ibn : kamiyalah

C. Riwayat pendidikan

- a. SDN 26 Sojo tahun 2013
- b. SMPN 8 Satap sojol tahun 2016
- c. SMAN 2 Sojol tahun 2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, Juni 2023

Penyusun,

Umi Yani

NIM :19.5.15.0089

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **(Analisis Literasi keuangan dan Promosi LPMUKP dalam Pengambilan Keputusan Kredit Oleh Para Nelayan di Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala).**" Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak pihak yang dengan tulus telah memberikan bantuan baik melalui nasehat, semangat, dan bantuan untuk penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Ayahanda Ahamd dan Ibunda kamiaya yang telah mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya. Aamiin.
2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu serta Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Mohamad Idhan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya yang

telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.

3. Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,serta para wakil dekan yaitu Ibu Dr. Ermawati., S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan, Drs. Sapruddin M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan,sekaligus sebagai pembimbing 1 dan Dr.Sitti Asyah,S.EI.,M.EI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
4. Terimakasih Dr.Sitti Asyah,S.EI.,M.EI Selaku pembimbing I. Racmawati A.Rifai,M.M sebagai pembimbing II
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang telah mendidik penulis dengan berbagai disiplin keilmuannya, semoga amal baik mereka membawa manfaat bagi peningkatan profesionalisme keilmuan.
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang telah membantu peneliti.
7. Terimakasih kepada Kakak saya sarnawia, nurdin, muis, toni,sunanti serta keluarga (sepupu) saya yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya
8. Terimah Kasih Nurlina sebagai teman saya dari SD sampai ke bangku perkuliahan yang sangat membantu penulisan dari tahap awal pembuatan proposal hingga penyelesaian skripsi.
9. Pengawas LPMUKP dan segenap karyawan yang telah Memberikan izin dan menerima peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka

penyelesaian study.

10. Kepada Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah 2019, terkhusus bagi seluruh teman-teman Perbankan Syariah – (3) angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian ini dan sama-sama menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi.

Akhirnya, Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang termuat dalam pengantar ini maupun tidak termuat semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, dan mendapat balasan kebaikan dan pahala dari Allah Swt.

Palu, Juli 2023

Penulis

Umi Yani

NIM. 19.515.0089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan dan manfaat penelitian	9
D. Penegasan istilah.....	10
E. Garis-garis besar isi.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan Teori	16
1. literasi keuangan.....	16
2. pengambilan keputusan kredit	23
3. Kredit	26
4. Promosi.....	34
5. LPMUKP.....	44
C. Kerangka Pemikiran.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	53

C. Kehadiran peneliti	53
D. Data dan Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data	56
G. Pengecekan Keabsahan Data	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN

1. Gambaran umum tentang lembaga pengelola modal usaha keluatan dan perikanan (LPMUKP)	59
a. Sejarah berdirinya lembaga (LPMUKP)	59
b. Maksud dan tujuan	62
c. Tugas dan fungsi LPMUKP	62
d. Sumber daya manusia LPMUKP	64
2. Peran lembaga pengelolah modal usaha dan perikanan (LPMUKP)	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAT HIDUP.....

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	9
2. Definisi Oprasional Variabel	43

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berfikir.....	39
2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar wawancara
2. Lembar Pengajuan Judul Skripsi
3. SK Pembimbing:
4. Surat Penelitian
5. Dokumentasi
6. Daftar Riwayat Hidup

Nama Penulis : Umi Yani
NIM : 195150089
Judul Skripsi : Analisis Literasi keuangan dan Promosi LPMUKP dalam Pengambilan Keputusan Kredit Oleh Para Nelayan di Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala ”

dalam konteks literasi keuangan dan promosi LPMUKP (Lembaga Perkreditan Mikro Usaha Kecil dan Perseorangan), terdapat beberapa aspek yang mungkin perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan kredit oleh para nelayan Analisis literasi keuangan Para nelayan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang konsep keuangan dasar, seperti pengelolaan pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. Literasi keuangan yang baik dapat membantu mereka dalam mengelola keuangan pribadi, mengevaluasi risiko, dan membuat keputusan kredit yang bijaksana. Promosi LPMUKP atau lembaga keuangan mikro sering kali memiliki peran penting dalam memberikan akses keuangan kepada para nelayan. Promosi yang efektif tentang layanan LPMUKP, seperti program kredit dengan suku bunga yang kompetitif, syarat pengajuan yang mudah, dan pelatihan keuangan tambahan, dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi para nelayan dalam pengambilan keputusan kredit.

Analisis kebutuhan kredit Para nelayan perlu melakukan analisis kebutuhan kredit dengan cermat. Mereka perlu mengevaluasi jumlah pinjaman yang diperlukan, tujuan penggunaan dana, jangka waktu pengembalian, dan kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman. Dengan melakukan analisis yang baik, mereka dapat meminimalkan risiko gagal bayar dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari kredit. Evaluasi kebijakan kredit: Para nelayan juga harus memahami kebijakan kredit yang ditetapkan oleh LPMUKP. Mereka perlu mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi, proses pengajuan kredit, suku bunga, dan persyaratan pengembalian. Dengan memahami kebijakan tersebut, mereka dapat memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memperoleh kredit dengan kondisi yang menguntungkan.

Kata kunci : iterasi keuangan, Promosi LPMUKP, Pengambilan keputusan kredit

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian dunia ini semakin berkembang, khususnya di Indonesia. perkembangan industri dan jasa keuangan telah mengalami kemajuan yang pesat beberapa tahun terakhir ini sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan kebijaksanaan Kredit merupakan salah satu produk perbankan yang sudah di kenal masyarakat luas Baik di perkotaan maupun pedesaan. sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan produk lembaga perbankan tersebut sebagai alternative sumber pembiayaan. Masyarakat lebih menyukai kredit bank maupun lembaga kreditan yang telah di sediakan karena lebih memberikan kepastian tentang bunga, cicilan dan jangka waktunya. Bahkan perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa di setiap lembaga yang memberikan modal dan berlomba-lomba memberikan layanan yang cepat dengan persyaratan yang mudah untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya. Dengan berbagai kemudahan kredit dapat membantu masyarakat dan dunia usaha yang membutuhkan dana untuk keperluan konsumsi maupun investasi.

Perkembangan zaman yang terus melangkah maju dan banyak menyumbangkan perubahan-perubahan, membangun tatanan dan peradaban baru,

seperti ideologi kemanusiaan, *life style* dan sebagai mana yang berdampak pada perilaku dan gaya hidup manusia. keinginan pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan yang semula sederhana berkembang lebih kompleks.¹ Sehingga dalam hal ini yang merupakan dasar terbentuknya gaya hidup yang berlebihan yang dimana permintaan pasar sebagaimana dipengaruhi oleh keadaan.

Pengaruh literasi yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan jaminan terhadap pengambilan kredit di instansi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelauatan dan Perikanan (LPMUKP). Hingga diperlukannya literasi keuangan bagi para pelaku pengambilan kredit, agar lebih memahami konsep dasar dari produk keuangan, melakukan perencanaan dan pengelola keuangan yang lebih baik, serta melindungi mereka dari penipuan dan usaha tidak sehat di pasar keuangan.

Keuangan merupakan pengetahuan penting guna meningkatkan masyarakat dimasa depan. Dalam hal ini beberapa variable fundamental literasi keuangan mencakup pemahaman diversifikasi resiko pada pengambilan kredit, tingkat pengetahuan masyarakat pesisir dibagian pekerjaan Nelayan. Sehingga Kredit yang memastikan bahwa permohonan pinjaman memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pinjaman, ini bukan hanya tentang jumlah pinjaman utama, tapi juga bunga yang di sepakati dengan kreditur bank.²

¹ Ahmad Kamaludindan Muhammad Alfian, *Etikan Menejemen Islam*, (Bandung CV.Pustaka Setia 2000). 21

² Naiyal, *Analisi kredit definisi tujuan* , (Jakarta redaksi OCBC). 15 November 2022

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPUMKP) yang dimana telah menyalurkan modal usaha kepada 11.613 wirausaha kelautan di tahun 2021 di Indonesia. Wirausaha kelautan dan perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia. hebatnya kredit macetnya (NPL) 0 persen. sehingga dalam hal ini dari segi pelayanan dan promosi di kelayakan masyarakat itu sendiri sangatlah baik hingga minat masyarakat untuk mengambil keputusan kredit di lembaga Keuangan LPUMKP begitu banyak peminatnya. kegiatan usaha yang ramah lingkungan menjadi persyaratan mutlak bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan ini pada dasarnya bertujuan mendukung pembangunan berbasis ekonomi di masyarakat.

Untuk memanfaatkan akses dalam mengembangkan ekonomi kelautan dan perikanan menggunakan persetujuan kredit, misal alat tangkapnya tidak ramah lingkungan atau tidak diatur, maka kami tidak memberikan pinjaman kepada pelaku usaha yang seperti itu.³ Menindak lanjuti penempatan pelayanan serta promosi untuk masyarakat pesisir yang mata pencarian perikanan nelayan yang dimana sebagian masyarakat lebih memahami serta menetapkan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPUMKP) sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Setiap lokasi layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPUMKP) dilengkapi paling tidak satu orang tenaga pendamping pada lokasi layanan pendampingan kredit.

³ Syarif Syahria, Direktur LPUMKP. (*executive Development program for Indonesia maritime youth leaders*)2021

Permodalan yang menjadi kendala bagi masyarakat nelayan, sulit akses, persyaratan yang berbelat-belit hingga ketidak tahuan masyarakat tentang lembaga pendanaan menjadi beberapa faktor nelayan enggan mengurus kredit bergulir. ketergantungan nelayan terhadap permodalan mandiri, penyisihan keuntungan usaha, meminjam dari anggota keluarga atau pun dari sumber keuangan informal lainnya masih sangat tinggi terjadi di Indonesia. Sehingga dalam hal ini melalui startegi promosi tenaga pendamping petugas LPMUKP yang dimana berhasil menarik minat nasabah untuk mengambil kreditan di instansi tersebut, karena diliat dari beberapa pertimbangan, maka para nelayan setuju mengambil keputusan kredit di lembaga tersebut.

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa (termasuk dana bergulir) yang dijual tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian pengaturan terkait Badan Layanan Umum (BLU) tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK. 05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lemabaga, dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (Satker BLU).⁴ Atas dasar hal tersebut, dibentuklah satuan kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebagai BLU dengan

⁴ Lembaga pengelola modal usaha dan perikanan selanjutnya di singkat LPMUKP

rumpun pengelolaan dana bergulir di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan LPMUKP dalam proses penyaluran dana, dan pengelolaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, Dimana nasabah yang mengambil dana kredit mulia dari 5.000.000,00 sampai dengan 100.000.000,00 dengan suku bunga yang telah disepakati bersama. Sehingga dari pemerintah perikanan dan kelautan, memberikan kemudahan pengkreditan guna untuk membangun sektor perkonomian di masyarakat. Dapat dilihat dari tabel dibawa ini penyaluran dana BLU LPMUKP pertahun :

Tabel 1.1

Dana kelolah LPMUKP / Tahun

NO	penyaluran BLU LPMUKP Per Tahun	Total Anggaran
1.	Penyaluran LPMUKP tahun 2018	Rp. 500.000.000.000,00
2.	Penyaluran LPMUKP tahun 2019	Rp.850.000.000.000,00
3.	Penyaluran LPMUKP tahun 2020	Rp.1.350.000.000.000.00
4.	Penyaluran LPMUKP tahun 2021	Rp.1.450.000.000.000.00

Sumber : Penyaluran Dana LPMUKP di Daerah Pesisir Kab. Donggala

Berdasarkan tabel di atas penyaluran dana LPMUKP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan adanya program penyaluran dana bergulir yang dikhususkan untuk masyarakat kelautan dan perikanan, diharapkan mampu untuk mendongkrak ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dengan membiayai pelaku usaha yang bersifat non bank yang diberikan pendampingan selama

menjadi debitur LPMUKP hingga pelaku usaha atau kelompok usaha tersebut menjadi pengusaha yang lebih baik. Dalam hal ini mengapa masyarakat di desa pangalasiang kecamatan Sojol kabupaten Donggala lebih tertarik mengambil kredit di LPMUKP ini dibandingkan dengan lembaga permodalan yang lebih dahulu ada sebelum LPMUKP karena beberapa faktor yang ada, yaitu dilihat dari tingkat promosi yang begitu lengkap dan dapat dipercayai, persyaratan serta jaminan yang tidak memberatkan nasabah dalam mengambil keputusan kredit, bunga kredit tidak terlalu besar 2% dari setiap kali pembayaran entah dalam durasi perbulan atau perenam bulanya, serta dapat dipercayai karena merupakan akses salah satu bantuan dari pihak kementerian perikanan dan kelautan. Sehingga dalam hal ini pengambilan kredit di Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) ini dari 2 tahun kemarin mengalami peningkatan, yang mulanya hanya beranggotakan 5 orang hingga kini menjadi 20 orang untuk wilayah kabupaten donggala kecamatan sojol desa pangalasiang.

Dampak langsung yang diharapkan dari penyaluran dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan LPMUKP ini, selain dapat memperkuat permodalan bagi Koperasi/LKM dan UKM, juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar perikanan, usaha garam rakyat serta usaha masyarakat pesisir lainnya, membantu perekonomian di masyarakat dari kalangan menengah atau miskin, sehingga dengan adanya kredit ini dapat membangun kembali proses literasi keuangan yang baik di masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi landasan utama mengapa masyarakat lebih memilih mengambil kredit di Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPUMKP) daripada lembaga kredit lainnya. Beberapa faktor tersebut dapat mencakup:

1. Fokus pada sektor kelautan dan perikanan: LPUMKP khusus difokuskan pada sektor kelautan dan perikanan. Masyarakat yang bergerak di sektor ini cenderung lebih tertarik dan terbantu dengan adanya lembaga yang memahami kebutuhan dan karakteristik usaha mereka.
2. Pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik: LPUMKP memiliki pemahaman yang mendalam tentang sektor kelautan dan perikanan serta tantangan yang dihadapi oleh para wirausaha di bidang ini. Hal ini membuat LPUMKP dapat memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran dan mendukung perkembangan usaha masyarakat nelayan.
3. Persyaratan yang sesuai: LPUMKP dapat merancang persyaratan kredit yang sesuai dengan karakteristik usaha kelautan dan perikanan, termasuk persyaratan lingkungan yang ramah. Ini memudahkan para pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan mendapatkan akses ke dana yang mereka butuhkan.
4. Suku bunga yang disepakati: Suku bunga yang ditawarkan oleh LPUMKP dapat disesuaikan dengan kapasitas dan risiko usaha kelautan dan perikanan. Hal ini memungkinkan para wirausaha mendapatkan kredit dengan suku bunga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan lembaga kredit lainnya.

5. Tenaga pendamping dan pelayanan yang baik: LPUMKP menyediakan tenaga pendamping yang membantu para wirausaha dalam proses pengajuan kredit dan pengembangan usaha. Hal ini memberikan rasa dukungan dan kepercayaan kepada masyarakat nelayan dalam memilih LPUMKP sebagai lembaga yang dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang baik.

Berdasarkan masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul Analisis Literasi Keuangan dan Promosi LPMUKP terhadap Pengambilan keputusan Kredit oleh para Nelayan di desa Pangalasiang kecamatan Sojol kabupaten Donggala. Dimana masyarakat daerah pangalasiang lebih berminat dalam mengambil kredit di LPMUKP dari pada lembaga kreditan yang lain .

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan semakain spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. dalam hal ini penulis lebih fokuskan pengaruh literasi keuangan suku bunga, kredit dan promosi LPUMKP terhadap pengambilan keputusan kredit oleh para Nelayan di Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Hal ini yang di maksudkan agar pembahasan tidak melebar dari yang dikehendaki, dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi keuangan para nelayan di Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala ?

2. Bagaimana model promosi LPMUKP dalam meningkatkan jumlah nasabah pengambilan kredit ?
3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengambilan kredit di LPMUKP ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kegiatan menyusun karya ilmiah ini tentulah terdapat tujuan yang ingin di capai serta kegunaan yang hendak didapatkan atau dirasakan manfaatnya. begitu pula dengan penelitian ini, tujuan dan manfaat secara sistematis dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan diatas dan agar memperoleh hasil yang diinginkan serta apa yang akan dilakukan lebih terarah maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui literasi keuangan para nelayan
- b. Untuk mengetahui model promosi LPMUKP dalam meningkatkan jumlah nasabah pengambilan kredit
- c. Untuk mengetahui Factor-factor yang mendukung dan menghambat pengambilan kredit di LPMUKP

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan merupakan nilai dari yang dihasilkan dalam penelitian dan dapat di rasakan langsung oleh berbagai pihak adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara akademis maupun praktis adalah:

- a. Secara akademisi

Dalam hal untuk membantu para nelayan mengetahui tentang literasi keuang dan suku bunga kredit.

- b. Secara praktis
 1. Sebagai masukan bagi para nelayan untuk mengetahui tentang kreditan bantuan LPUMKP agar para masyarakat mengerti cara mengelolah usaha mereka dari modal pengkreditan.
 2. Bagi para pemerintahan atau instansi yang bersangkutan akan memperoleh umpan balik yang nyata dari masyarakat yang menggunakan fasilitas kerditan agar menjadi bahan evaluasi demi keberhasilan di masa mendatang.

D. Penegasan Istilah

Agar pembaca bisa memahami konsep yang dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan penjelasan untuk menghindari kesalahpahaman membaca terhadap judul tersebut dengan memberikan penegasan istilah antara lain:

1. literasi keuangan

Pengaruh literasi keuangan dan kredit, literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Adanya kesadaran ini memiliki efek jangka panjang yang dapat menjaga kondisi keuangan tetap stabil, aman, dan sejahtera.

2. Kredit dan Promosi

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.

3. Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan Perikanan (LPMUKP)

Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan Perikanan LPMUKP adalah melaksanakan pengelolaan pinjaman dan pembiayaan dana bergulir yang berdampingan bagi pelaku usaha sector kelautan dan perikanan untuk masyarakat.

E. Garis-garis Besar Isi

Sestimatika penulisan ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari keseluruhan pembahasan, yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan proposal ini. Adapun sestematika penulisan proposal ini terdiri dari 3 Bab.

Bab I adalah Bab pendahuluan, yang dalam bab ini memuat latar belakang, berfungsi untuk mengungkapkan latar belakang dan segala seluk beluk persoalan yang berkaitan dengan mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian dan manfaat atau pentingnya penelitian, kerangka pemikiran berfungsi agar pembahasan lebih terarah dan garis-garis besar isi.

Bab II adalah bab kajian pustaka, yang memuat penelitian terdahulu kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab III berisi metode penelitian yang mencakup pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa hasil penelitian terdahulu, terkait dengan penelitian yang akan di lakukan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama /judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
1. Herwiyanti Elinda dengan judul penelitian (skripsi) <i>pengaruh literasi keuangan,tingkat suku Bunga,kualitas layanan dan jaminan terhadap pengambilan kredit perbankan oleh UKM</i> ". ¹	- literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan kredit perbankan oleh UKM. - tingkat suku Bunga yang tidak berpengaruh terhadap pengambilan kredit perbankan oleh UKM. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan	- Variabel independen (pengaruh literasi keuangan, pengambilan kredit)	- Lokasi penelitian - Pengambilan sampel - Jumlah sampel 100

¹ Herwiyanti Elinda, "*pengaruh literasi keuangan,tingkat suku Bunga,kualitas layanan dan jaminan terhadap pengambilan kredit perbankan oleh UKM*"jurnal dan perpajakan Jogjakarta vol 2 No 1 (2020)

	<p>terhadap pengambilan kredit perbankan oleh UKM.</p> <p>- Metode penelitian kuantitatif</p>		
<p>2. Luvi Nur Farida (skripsi)</p> <p><i>Analisis pengaruh literasi keuangan,suku Bunga Kredit dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pengambilan kredit (studi pada PT.Mandiri Tunas Finance Regional 7 malang)</i>²</p>	<p>- Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit pada PT.Mandiri Tunas Finance Regional malang</p> <p>- Suku Bunga kredit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit .</p> <p>- Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit.</p> <p>- Metode penelitian kualitatif</p>	<p>- Variable, analisis pengaruh literasi keuangan, keputuasan pengambilan kredit</p>	<p>- Jumlah sampel 101</p> <p>- Variabel <i>independen</i>, kualitas produk</p>

² Luvi Nur Farida “ *Analisis pengaruh literasi keuangan,suku Bunga Kredit dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pengambilan kredit (studi pada PT.Mandiri Tunas Finance Regional 7 malang)* skripsi (malang :universitas Yudharta 23 oktober 2021)

<p>3. Ahmad Bagas Restyono (skripsi)</p> <p><i>pengaruh kredit dan promosi, terhadap keputusan dalam pengambilan dan kur UKM”³</i></p>	<p>- harga, promosi dan kualitas produk memberikan pengaruh terhadap keputusan mengabil dana kur yang telah disediakan, yang di mana mempunyai pengaruh positif terhadap minat mengabil modal tersebut.</p> <p>- Metode penelitian kuantitatif</p>	<p>- variabel (kredit dan promosi)</p>	<p>jumlah sampel</p>
<p>4. Nujmatul Laily (skripsi)</p> <p><i>“Pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku mahasiswa dalam mengelolah keuangan”</i></p>	<p>- Hasil penelitian ini menunjukan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa akan tetapi gender, usia, kemampuan akademis dan pengalaman kerja tidak terbukti memiliki korelasi dengan perilaku keuangan mahasiswa.</p>	<p>- Jenis penlitain Kuitatif</p> <p>- Pengaruh literasi keuangan</p>	<p>- Lokasi penelitian</p> <p>- Pengambilan sampel</p>

³ Ahmad Bagas Restyono *“pengaruh kredit dan promosi, terhadap keputusan dalam pengambilan dan kur UKM”* skripsi (Bandung : universitas Yudharta 28 juni 2002)

	<p>Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan merupakan determinan perilaku keuangan.</p> <p>- Metode penelitian kualitatif</p>		
--	---	--	--

B. Kajian Teori

1. Literasi Keuangan

Di lihat pentingnya pengetahuan yang mendalam tentang literasi keuangan membuat pendidikan literasi keuangan sangat diperlukan untuk mendidik manusia yang sadar dan faham tentang bagaimana cara mengelola keuangan secara bijak dan sesuai kebutuhan.⁴

Otoritas jasa keuangan mengidentifikasi bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan skill dan keyakinan (*confidence*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadi lebih baik.

Literasi keuangan memiliki jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat:

⁴ Yuna.M, Ekonomi literasi keuangan (Jakarta tahun 2001). *jurnal Ar-raniry.ac.id.5*

- a. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*.
- b. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Literasi keuangan pada individu menjadi ketertarikan tersendiri bagi seseorang, karena dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan bagi seseorang sehingga secara lebih efisien, Seiring dengan perkembangan teknologi juga yang semakin canggih seharusnya bisa dimanfaatkan seseorang untuk menambah wawasan dan bahan untuk media belajar, sehingga bisa mengelola keuangan yang baik sejak dini, semakin siap dalam menghadapi dunia kerja.

Maqashid al-Syariah atau tujuan dari syariah adalah dasar yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan islami. Tujuan dari syariah Islam adalah agar manusia mendapatkan *al-falah* yaitu keberhasilan atau kemenangan dalam hidupnya di dunia dan di alam akhirat nanti. Keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat adalah jika berhasil memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kesejahteraan di akhirat kelak. Tinjauan tentang pengelolaan keuangan secara tidak langsung dijelaskan dalam Q.S Al-Hasyr [59] ayat 18 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيْرِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya

*untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*⁵

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, Perintah untuk memerhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok dipahami sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Mereka dituntut untuk memerhatikannya kembali agar menyempurnahkannya bila telah baik, atau memperbaikinya bila masih ada kekurangannya, sehingga jika tiba saatnya diperiksa, tidak ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna. Setiap mukmin dituntut untuk melakukan hal tersebut.⁶

Dalam Al-Quran terdapat beberapa contoh bagaimana mengelolakeuangan secara islami diantaranya:

- a. Meninggalkan riba (sistem bunga) dan kembali kepada sistem ekonomisyariah.
- b. Meninggalkan segala bentuk pemborosan harta.
- c. Meninggalkan segala bentuk usaha yang batil dalam mencari penghasilan.
- d. Meninggalkan segala bentuk usaha yang spekulatif atau perjudian.
- e. Memperbanyak amal atau meninggalkan sifat kikir terhadap harta

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai objek zakat.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Situs Resmi kemaq, (Jakarta tahun 2010). 58

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 552-553

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji tingkat literasi keuangan pada masyarakat nelayan yang ada di pesisir pantai dalam pengelolannya dan faktor yang mempengaruhi seperti karakteristik demografis serta perilaku keuangan. Beberapa hal indikator yang berkaitan dengan literasi keuangan di antaranya:

a. Literasi keuangan adalah Investasi

Literasi keuangan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang bermanfaat dalam mengelola dan menjaga kondisi keuangan Sobat Sikapi agar tetap terjaga atau stabil.

b. Dapat memilih strategi dan keputusan keuangan yang tepat

Dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat dan hal tersebut tidak terlepas dari aspek keuangan sehingga membuatnya menjadi semakin kompleks, oleh karena itu dengan memiliki literasi keuangan yang baik dapat membantu Sobat untuk memilih strategi dan keputusan keuangan yang tepat.

c. Mampu bertanggung jawab pada keputusan keuangan yang diambil

Dengan literasi keuangan yang baik, Sobat akan mampu untuk bertanggung jawab atas setiap pengambilan keputusan karena telah memahami faktor-faktor pendukung dalam pengambilan keputusan tersebut.

d. Literasi keuangan memengaruhi kekayaan finansial

Literasi keuangan dapat mendukung pertumbuhan kekayaan finansial, misalnya dengan memiliki literasi keuangan yang cukup maka dapat menentukan produk investasi yang tepat sesuai kebutuhan dan kemampuannya sehingga

dikemudian hari imbal hasilnya mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan. Literasi sangat berpengaruh penting dalam pengelolaan mengenai keuangan sehingga ekonomi kedepannya bisa lebih baik. dengan adanya literasi yang baik dapat menejemenkan segala bentuk perkonomian yang ada.

Dalam analisis literasi keuangan, berbagai indikator digunakan untuk mengukur tingkat literasi keuangan, seperti tes literasi keuangan, perilaku keuangan, akses dan penggunaan produk keuangan, tingkat tabungan, perencanaan keuangan, pemahaman produk keuangan, dan partisipasi dalam program literasi keuangan. Melalui analisis ini, informasi yang diperoleh dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan dan tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan individu atau masyarakat tertentu. Hasil analisis literasi keuangan dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program pendidikan keuangan yang lebih efektif, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan keuangan, dan mengembangkan strategi untuk memperbaiki pemahaman dan perilaku keuangan. Dengan meningkatkan literasi keuangan, individu dan masyarakat dapat menjadi lebih mampu mengambil keputusan keuangan yang cerdas, melindungi diri dari risiko keuangan, memanfaatkan peluang investasi, mengelola anggaran dengan baik, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

e. Suku Bunga

Suku Bunga di artikan sebagai balas saja yang di berikan bank kepada nasaba yang beli dan menjual produknya. menurut Keynes tingkat Bungan merupakan suatu fenomena moneter. artimya tingkat Bunga di tentukan oleh

pemerintah dan penawaran akan uang (pasar uang).uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi (GNP), sepanjang uang tersebut mempengaruhi tingkat bunga.⁷

Tingkat suku bunga pembiayaan dana bergulir melalui pola konvensional untuk penyaluran dari BLU LPMUKP secara langsung kepada Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Kelautan dan Perikanan (UMKM-KP) serta Lembaga Keuangan Mikro Kelautan dan Perikanan/Lembaga Keuangan Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank, tingkat suku bunga yang diberlakukan adalah tingkat suku bunga tetap (*flat rate*) yaitu paling tinggi adalah sebesar 4% per tahun. Namun untuk saat ini, LPMUKP memberlakukan tarif layanan untuk pola konvensional yang disalurkan secara langsung adalah sebesar 3% per tahun.

Sedangkan apabila penyaluran dana bergulir dilakukan dari Lembaga Keuangan Mikro Kelautan dan Perikanan, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, kepada UMKM-KP yang berlokasi di Kabupaten Kota dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang lebih rendah atau sama dibandingkan rata-rata IKK di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia menurut publikasi terakhir oleh BPS maka tingkat suku bunga yang berlaku paling tinggi sebesar 7%. Kemudian untuk UMKM-KP yang berlokasi Kabupaten/Kota dengan IKK yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata IKK di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia menurut publikasi terakhir oleh BPS maka tingkat suku bunga yang berlaku paling tinggi adalah sebesar $[4\% + x 3\%]$ per

⁷ Keynes, *Tingkat suku Bunga*, (Jakarta CV.Pustaka setia,2001), 22

tahun. Untuk pembiayaan dana bergulir dengan pola syariah secara umum terdiri atas:

1. Nisbah pembiayaan *mudharabah*
2. Nisbah pembiayaan *musyarakah*
3. Margin pembiayaan *murabahah*
4. Nilai *ujroh* dalam pembiayaan *ijarah*
5. Nilai *ujroh* dalam pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik*
6. Nilai *ujroh* biaya gadai dalam pembiayaan *rahn*
7. Pola syariah lainnya yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional

f. Suku bunga Real (*Real Interest Rate*)

Suku Bunga merepresikan suatu pembayaran pada masa yang akan datang karna ada pemindahan pada masa lalu. Misalnya seseorang yang medepositokan uangnya ke bank (pemindahan uang dari sesorang ke bank) contoh lain seseorang meminjam uang yang dari bank (pemindahan uang dari bank ke seseorang) dan orang tersebut harus membayar bunga kepada bank (pembayaran pada masa yang akan datang).

Suku bunga terbagi menjadi dua, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga adalah suku bunga yang belum memperhitungkan tingkat inflansi (menunjukkan jumlah uang yang meningkat di tabungan). Suku bunga real adalah suku bunga yang suda memperhitungkan tingkat inflansi (menunjukkan peningkatan atau penurunan kekuatan daya beli tabungan). Suku bunga real adalah suku Bunga nominal di kurangi tingkat inflansi. suku bunga rael yang umumnya di

jadikan acuan adalah *risk-free rate* (dalam khusus Indonesia adalah SBI)di kurangi inflansi.⁸

2. Pengambilan keputusan kredit

Dilihat dari hubungan antara nilai jaminan dan keputusan pemberian kredit modal kerja sangat berkaitan, karena jaminan yang di berikan oleh nasabah mampu menjamin kredit yang telah di berikan pihak bank kepada nasabah. jaminan kedaan disini lebih dibutuhkan dari pada hanya sekedar jaminan kepercayaan dari nasabah. Hal ini menegaskan bahwa jaminan akan menjamin pembayaran kredit nasabah guna menggunakan pengambilan keputusan kredit di lembaga keuangan LPMUKP. Terdapat 7 langkah dalam pengambilan keputusan yang efektif.⁹

a. Identifikasi keputusan yang akan diambil

Lakukan indetifikasi masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan segera. Identifikasi bertujuan agar menghindari bias keputusan.

b. Mengumpulkan informasi dan data pendukung

Kumpulkan berbagai informasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Semakin banyak informasi yang diperoleh, makin luas pembahasan dalam proses pengambilan keputusan yang efektif.

⁸ Mankiw, *principle*. (Jakarta 2004). 530

⁹ Management Study Guide. 2020. What is Decision Making ? [online]. Link: <https://www.managementstudyguide.com/what-is-decision-making.htm> (Accessed: 1 April 2022)

c. Membuat alternatif pilihan

Setelah informasi terkumpul, proses pengambilan keputusan melalui tahapan diskusi atau bertukar pikiran antartim. Pemimpin dan tim membuat beragam alternatif pilihan.

d. Menimbang informasi yang diperoleh

Dari berbagai alternatif pilihan keputusan, selanjutnya timbang sisi positif dan negatif jika pilihan tersebut diambil. Jangan lupa minta masukan dari berbagai pihak untuk mendapatkan keputusan efektif.

e. Tentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada

Setelah bertukar pikiran dan menimbang informasi, pemimpin mengerucutkan pada satu pilihan terbaik. Dengan berbagai pertimbangan dan kematangan informasi yang diperoleh.

f. Menjalankan keputusan efektif

Langkah utama dalam proses pengambilan keputusan adalah menentukan keputusan tersebut. Ambil aksi nyata dalam keputusan yang telah dipikirkan panjang.

g. Review dan evaluasi keputusan yang diambil

Setelah mengambil keputusan, jangan lupa untuk melakukan evaluasi dan review terhadap keputusan yang telah dijalankan. Untuk menjadi keputusan yang efektif, pastinya terus adanya perbaikan.

Indikator pengambilan keputusan kredit adalah faktor atau informasi yang digunakan oleh lembaga keuangan atau kreditur untuk mengevaluasi kelayakan peminjam dan memutuskan apakah suatu kredit dapat disetujui atau tidak.

Indikator-indikator ini memberikan panduan dalam mengukur risiko kredit, kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman, dan kelayakan proyek atau usaha yang akan didanai. Berikut adalah beberapa indikator pengambilan keputusan kredit yang umum digunakan:

1. **Riwayat Kredit (Credit History):** Riwayat kredit peminjam mencakup informasi tentang pinjaman sebelumnya, pembayaran tagihan, dan keterlambatan pembayaran. Lembaga keuangan akan melihat riwayat kredit ini untuk mengevaluasi kepatuhan peminjam dalam membayar kewajiban utang mereka.
2. **Skor Kredit (*Credit Score*):** Skor kredit adalah angka yang mencerminkan profil kredit peminjam berdasarkan data riwayat kredit mereka. Skor kredit digunakan untuk mengukur risiko kredit dan memprediksi kemampuan peminjam dalam membayar kembali pinjaman. Skor kredit diperoleh dari lembaga pemantau kredit yang mengumpulkan informasi tentang riwayat kredit peminjam.
3. **Rasio Utang Terhadap Pendapatan (*Debt-to-Income Ratio*):** Rasio ini mengukur proporsi utang peminjam terhadap pendapatan mereka. Lembaga keuangan menggunakan rasio ini untuk menilai kemampuan peminjam dalam membayar kembali pinjaman berdasarkan pendapatan yang mereka miliki.
4. **Jaminan (*Collateral*):** Jaminan adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman. Lembaga keuangan akan menilai nilai dan jenis jaminan yang ditawarkan oleh peminjam untuk menentukan tingkat

keamanan pinjaman. Jaminan dapat berupa properti, kendaraan, atau aset berharga lainnya.

5. **Kondisi Keuangan dan Bisnis:** Lembaga keuangan akan melihat kondisi keuangan dan bisnis peminjam, termasuk laporan keuangan, arus kas, dan prospek bisnis. Informasi ini membantu dalam mengevaluasi kelayakan proyek atau usaha yang akan didanai dan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
6. **Karakter dan Reputasi:** Faktor lain yang dipertimbangkan adalah karakter dan reputasi peminjam. Lembaga keuangan akan melihat rekam jejak peminjam dalam melunasi kewajiban keuangan, hubungan bisnis yang baik, dan integritas peminjam secara keseluruhan.

Penggunaan indikator pengambilan keputusan kredit ini membantu lembaga keuangan dalam mengevaluasi risiko kredit, memitigasi kerugian, dan memastikan kelayakan peminjam sebelum menyetujui kredit.

3. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit secara umum berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan di bayar sesuai dengan waktu yang di sepakati, secara ringkas, kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uangan untuk membeli produk dan pembayarannya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dengan di kenakan biaya.

Menurut pasal 1 (11) UU No.10/1998 menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁰

Dalam hal ini untuk lebih memahami serta Mengenal prinsip 5C perbankan di antaranya :

a) *Character*

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian atau karakter calon peminjam/nasabah. Hal ini akan dinilai dari hasil wawancara antara *Customer Service* dengan nasabah yang hendak mengajukan kredit dengan pertanyaan seputar latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain.

b) *Capacity*

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Faktor ini juga menentukan kemampuan membayar cicilan pinjaman seseorang kepada bank, seperti apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak.

c) *Capital*

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Contoh

¹⁰ Ahmad Abdullah, “ pinjam kredit dalam prefektif pendidikan islam” *jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.3, No.1, 2019

penilaian dari sisi capital adalah seperti berapa besar saldo tabungan, deposito, atau aset investasi lainnya yang dimiliki calon peminjam.

d) *Collateral*

Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Umumnya, semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman maka akan semakin besar pula poin penilaiannya. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para calon peminjam, sebab ketika kamu tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

e) *Condition*

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah/calon peminjam. Misalnya, usia minimal peminjam, jumlah pinjaman, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya.

Menurut Thomas Suyatno, menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang, atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang di pinjam beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan. sedangkan pendapat lain menanyakan kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit serta pembelian

surat berharga. sedangkan dalam termonologi Indonesia, kredit diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengansur.¹¹

Maksud kredit adalah sesuatu yang di bayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Jadi kredit yaitu memberi kn benda, jasa, uang sekarang dengan pembayaran atau balas jasa di kemudian hari.¹² Berdasarkan undang-undang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank yang pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk pihak lain, yang wajib pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembersian buang. kredit disediakan oleh bank umum konvesiaonal. kredit dalam hal ini terdapat beberapa unsur di antaranya :

a. Kepercayaan

Seperti yang di ketahui sesuai dengan asal muasal kata kredit dan juga pengertian menurut UU perbankan, kegiatan pemberian kredit didasarkan pada rasa kepercayaan. Dengan begitu dapat terjadi kesepakatan pinjam meminjam antara kedua belah pihak dalam periode yang ditentukan.

¹¹ Ibid

¹² Riyan Pratiwi, "Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli kredit Prespektif Etika Bisnis Islam (studi khusus pada toko media elektronik simpan random kecamatan Way seputih kabupaten alampung tengah)". (skripsi diterbitkan, program studi ekonomi syariah. fakultas ekonomi dan bisnis islam .IAIN Metro ,2018)

b. Waktu

Kemudian Unsur kredit yang kedua ialah waktu. Dimana hal ini sesuai kesepakatan yang ada, terdapat rentang waktu dalam periode tertentu antara pemberian kredit dengan pelunasan pinjaman yang telah di sepakati

c. Penyerahan

Berikutnya yaitu penyerahan sejumlah pinjaman dari kreditur kepada debitur dan harus dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh kedua pihak.

d. Perjanjian atau Kesepakatan

Unsur yang ketiga yaitu adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur, yang dibuktikan dengan adanya perjanjian tertulis dan legal.

e. Risiko

Meski tidak disebutkan secara langsung dan jelas, akan tetapi risiko menjadi unsur terakhir kredit yang tak dapat dihindari. Selama rentang waktu antara pemberian pinjaman hingga pelunasan, akan ada kemungkinan risiko yang terjadi. Seperti kredit macet, atau pelunasan melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu dalam kesepakatan akan selalu ada poin antisipasi akan timbulnya risiko ini.

b. Kredit dalam sudut pandang islam

Secara prinsip, pengeluaran harusnya lebih kecil dari pendapatan. Maka dari itu kredit hadir sebagai solusi agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan itu. Pandangan Islam terhadap fenomena kredit tersebut telah banyak di bahas oleh beberapa ulama antara lain majelis ulama Indonesia.

Dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia melihat kredit dari beberapa pendekatan seperti melihat dari unsur ribah di dalam kredit di jelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Hidayatulloh SHI MH menjelaskan definisi *riba*. *Riba* secara bahasa artinya *ziyadah* (tambahan). Dia mengutip Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, *riba* adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (*bila 'iwadh*) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (*ziyadah al-ajal*) yang diperjanjian sebelumnya (ini yang disebut *riba nasi'ah*).¹³

Dalam hal ini beberapa ketentuan-ketentuan dalam jual beli kredit antara lain adalah:

1. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga kredit dan jangka waktu pembayaran.
2. Penjual dan pembeli harus menentukan akad jual beli yang ditawarkan, yaitu tunai atau kredit.

Dalam sebuah *hadits* yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi reuni:

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. [رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي]

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa menjual dua transaksi dalam satu transaksi, maka kerugiannya atau *riba*”. (HR. at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi)¹⁴

¹³ Hidayatulloh, *kredit yang berkaitan dengan Riba* (Bandung : MUI 20 Januari 2007).67

¹⁴ Hadis Abu Dawud dan Al-Baihaqi, *Depertemen Agama RI* (Semarang PT.Karya Toha Putra 1996)

Berdasarkan hadis di atas Abu Dawud dan al-Baihaqi maka penulisan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dua akad dalam satu transaksi”, misalnya, seseorang berkata: “Aku jual sepeda motor ini, mulai dari Rp 12.000.000, – kredit Rp 15.000.000, -” , kemudian berhenti berpisah dari majelis akad tanpa ada kesepakatan pembelian, tunai atau kredit. Maka akad jual beli ini batal adanya. menentukan satu pilihan dari dua opsi yang ditawarkan, maka jual beli itu sah, dan sesuai dengan harga yang disepakati.

Dalil tersebut diperkuat beberapa hadits Nabi Muhammad saw, salah satunya adalah riwayat Imam Muslim: Dari Jabir RA, dia berkata, “Rasulullah saw, melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Dia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.”

Sehingga dalam hal ini Keumuman nash al-Quran surat al-Baqarah [2] 275 menjelaskan bahwa:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah : 275)¹⁵

¹⁵ Depertemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang : PT.Karya Toha Putra 1996) 78

Dalam ayat ini, Allah mempertegas keabsahan jual beli secara umum, kehalalan ini mencakup semua jenis jual beli, termasuk di dalamnya larangan kredit kredit, menolak dan menolak konsep ribawi.

Hidayatulloh mengatakan ada beberapa jenis riba menurut para ulama. Menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali riba dibagi menjadi riba fadhl dan nasi'ah. Syafi'iyyah membagi riba menjadi fadhl, nasi'ah, yad, dan qardh. Sedangkan Ibn Ruysd membagi menjadi riba jual beli (bai') dan riba karena hutang. Riba jual beli terdiri dari riba fadhl dan riba nasa', sedangkan riba duyun terdiri dari nasi'ah dan jahiliyah.¹⁶ Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Praktik di bank konvensional, kredit adalah utang piutang yang disertai bunga. Jika persoalan riba sudah ditegaskan keharamannya, persoalan bunga bank adalah masalah kontemporer yang memerlukan ijtihad. Kita dapat merujuk kepada beberapa keputusan ulama internasional antara lain *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965, *Majma' al-Fiqh al-Islamy* negara-negara.

Organisasi Kerjasama Islam yang diselenggarakan di Jeddah 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 yang menetapkan keharaman bunga bank. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, yakni riba nasi'ah. Dengan

¹⁶ Hidayatulloh, *Jenis Riba di lihat dari Prespektif Islam* (Bandung 2015). 57

demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Oleh sebab itu, praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan individu. Menurut Ustadz Hidayatulloh, dalam ajaran Islam, kredit atau utang diperbolehkan dengan syarat tidak ada *ziyadah* (tambahan). Maka dikenal istilah *qardh* (utang piutang) yang termasuk akad *tabarru'* (tolong menolong).

3. Promosi

a. Pengertian Promosi

Promosi adalah aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan membelinya.¹⁷ Promosi penjualan merupakan aktifitas pemasaran yang mengurus nilai tambah dari suatu produk untuk mendapatkan lebih dari sekedar yang ada dalam nilai produk dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mendorong pembelian konsumen aktifitas penjualan atau mendorong upaya yang dilakukan tenaga penjualan (*sales forces*). Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran merupakan aktifitas perusahaan yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, atau meningkatkan pasar sasaran atas lembaga dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan royal kepada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.¹⁸

¹⁷ Danang Suyonto, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran konsep strategi dan kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2014). 154

¹⁸ Buchari Alma dan Rantih Hurriati, *Manajemen Corporate strategi & pemasaran jasa pendidikan (focus pada mutu pelayanan primai)*, (Bandung : Alfabeta, 2008). 166

b. Tujuan Promosi

Tujuan promosi menurut Lamb adalah:¹⁹

1. Meberikan informasi
 - a. Meningkatkan kesadaran atas produk baru, kelas produk, atau atribut produk
 - b. Menjelaskan bagaimana produk tersebut bekerja
 - c. Menyarankan kegunaan baru suatu produk
 - d. Membangun citra pada pruduk
2. Membujuk pelanggan sasaran (*persuading*)
 - a) Mendorong perpindahan pendek
 - b) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk
 - c) Mempengaruhi pelanggan untuk membeli sekarang
 - d) Merayu pelanggan untuk datang
3. Mengingat (*reminding*)
 - a) Meningkatkan konsumen bahwa produk mungkin dibutuhkan dalam waktu dekat ini
 - b) Meningkatkan konsumen dimana untuk membeli produk tersebut
 - c) Mempertahankan kesadaran konsumen

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. apabila tujuan utama promosi telah terlaksana maka hal tersebut

¹⁹ Wiran Anuraga, "pengaruh produk, harga, promosi dan merek terhadap keputusan pembelian ulang" *Jurnal ilmu riset manajemen*, (10 Oktober 2015). 7

akan menciptakan loyalitas konsumen yang di mana ketika loyalitas konsumen telah terbentuk akan membuat basis perusahaan itu menjadi semakin kuat.²⁰

c. Sifat-sifat Promotion Tools (*MarketingCommunication Mix*)

a. Sifat Advertising

1) Presentasi Umum

Advertising yang bersifat umum tersebut memberikan semacam keabsahan pada produk dan menyarankan tawaran yang terstandardisasi

2) Tersebar Luas

Media yang berdaya sebar luas yang memungkinkan penjual mengulang pesan berkali-kali dan juga memungkinkan pembeli menerima dan membandingkan pesan dari berbagai pesaing.

3) Ekspresi Yang Lebih Kuat

Periklanan memberikan peluang untuk mendramatisasi bank dan produknya melalui penggunaan cetakan, suara, dan warna yang penuh seni.

4) Tidak Bersifat Pribadi

Audiens sasaran tidak merasa wajib untuk memberikan perhatian dan menanggapi advertising. Iklan hanya mampu melakukan monolog, bukan dialog, dengan audiens.²¹

b. Sifat Sales Promotion (Promosi Penjualan)

²⁰ Parys Laily Nasution, *Analisis pengaruh strategi bauran pemasaran terhadap keputusan mahasiswa memilih kuliah di business colleg lembaga pendidikan dan pengembangan profesi Indonesia (LP31) Medan, Tesis,* (Universitas sumatra utara, medan, 2007) (Diakses 10 maret 2019)

²¹ Sutanto Herry, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung :Pustaka Setia, 2013), 380-381

- 1) Komunikasi Promosi penjualan menarik perhatian dan biasanya memberikan informasi yang dapat mengarahkan nasabah ke produk yang bersangkutan.
- 2) Insentif Promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan, atau kontribusi yang memberi nilai bagi nasabah.
- 3) Ajakan Promosi penjualan merupakan ajakan untuk melakukan transaksi pembelian sekarang.

c. Sifat *Public Relations and Publicity*

- 1) Kredibilitas yang tinggi

Cerita dan gambar mengenai beritanya lebih otetik dan dipercaya oleh pembaca dibandingkan dengan iklan

- 2) Kemampuan menangkap pembeli

Ketika yang tidak dibidik sebelumnya Humas dapat menjangkau banyak calon pembeli yang cenderung menghindari wiraniaga dan iklan

- 3) Dramatisasi

Humas memiliki kemampuan untuk mendramatisasi suatu bank atau produk

d. Sifat *Personal Selling*

- 1) Konfrontasi Personal

Personal Selling mencakup hubungan yang hidup, langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak dapat mengobservasi reaksi dari pihak lain dengan lebih dekat

2) Mempererat

Personal Selling memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan, mulai hubungan penjualan sampai dengan hubungan persahabatan

3) Tanggapan

Personal Selling membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengarkan pembicaraan wiraniaga

e. Sifat *Dirrect Marketing*²²

- 1) Nonpublik Melalui *dirrect marketing* , pesan ditujukan kepada orang tertentu
- 2) Disesuaikan Melalui *dirrect marketing*, pesan dapat menarik orang yang dituju
- 3) Terbaru Melalui *dirrect marketing*, pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat
- 4) Interaktif Pesan melalui *dirrect marketing* dapat diubah bergantung pada tanggapan orang tersebut.

d. Teknik Promosi

a. *Personal Selling*

Personal selling (penjualan personal) adalah presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan untuk tujuan menghasilkan penjualan dan membangun sasaran. *Personal selling* melibatkan interaksi secara langsung antara penjual

²² Sutanto Herry, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah.*, 380-382

dengan pembeli potensial.²³ *Personal selling* merupakan alat yang paling efektif terutama dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Alasannya adalah karena penjualan pribadi, jika dibandingkan dengan periklanan, memiliki beberapa manfaat tersendiri yaitu pertama, *personal selling* mencakup hubungan yang hidup, langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. Kedua, *personal selling* memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan mulai dari hubungan penjualan sampai ke hubungan persahabatan. Menurut Kotler & Keller, proses *personal selling* yang efektif dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahap yaitu:

1. *Prospecting and qualifying*

Langkah pertama dalam melakukan penjualan adalah mengidentifikasi dan mengkualifikasi prospek yang akan di temui.

2. *Pre-approach*

Pada tahap ini, penjual perlu untuk mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan prospek seperti apa saja yang dibutuhkan, siapa saja yang terlibat dalam keputusan pembelian.

3. *Presentation and demonstration*

Pada tahap ini, seorang sales mempresentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan produk yang ditawarkan. Disini, penjual dapat menggunakan formula AIDA (*attention, interest, desire dan action*).

4. *Handling objection*

Pada tahapan ini, pembeli akan mengutarakan beberapa keberatan

²³ Kotler, *Personal selling (penjualan personal)* . 2016

mengenai apa yang dipresentasikan oleh tenaga penjual seperti jadwal pengiriman, harga terlalu mahal, kualitas produk.

5. *Closing*

Tahap ini merupakan tahap dimana pembeli membuat keputusan akan melakukan transaksi atau tidak. Jika *handling objection* dapat ditangani dengan baik, kemungkinan pembeli melakukan transaksi sangat besar.

6. *Follow up*

Follow up diperlukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Penjual dapat sekedar menelepon pembeli untuk menanyakan apakah adanya masalah yang tidak diinginkan.

b. Advertising (Iklan)

Itu penting karena *advertising* yang tepat dapat menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk atau fitur-fitur baru dari produk yang sudah ada. Melalui periklanan, perusahaan berharap dapat memberikan informasi yang akurat tentang kegunaan, kualitas serta manfaat-manfaat yang relevan dengan produk yang ditawarkan. Berdasarkan tipe media yang digunakan, maka *advertising* dibedakan menjadi :

1. *Advertising* Cetak seperti Koran, majalah,
2. *Advertising* Elektronika seperti webside, radio, televisi,
3. *Transit Advertising* seperti bulletin, poster/spanduk, stiker,
4. *Advertising* Khusus yaitu segala macam barang yang bentuknya berupa hadiah.

c. *Sales Promotion* (promosi)

Menurut definisi *Kotler*, promosi penjualan adalah insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan dari suatu produk dan jasa. Promosi penjualan bisa termasuk berbagai jenis peralatan yang mempunyai sifat unik seperti kupon, perlombaan, pemotongan harga, hadiah dan lain-lain. Tujuan – tujuan promosi penjualan tersebut dapat digeneralisasikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industrial dan konsumen akhir
2. Meningkatkan kinerja pemasaran jika menggunakan perantara
3. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan *personal selling* dan iklan

d. *Direct Marketing*

Secara umum Secara umum *direct marketing* dapat dikatakan sebagai pemasaran yang langsung menyasar langsung kepada konsumen yang ditargetkan, dengan tujuan menyampaikan pesan marketing yang lebih minim biaya dengan memanfaatkan berbagai media. Menurut *Kotler*, ada beberapa bentuk *direct marketing* yang bisa dilakukan. Diantaranya adalah:²⁴

1. Personal Selling
2. Telemarketing
3. Direct Mail
4. Catalog Marketing
5. Direct Response
6. Online Marketing

²⁴ Kotler, *Direct marketing*. 2010

7. Television Marketing

8. Kiosk marketing

Suatu informasi produk walupun dengan cara bebas memiliki kreasi penyampainnya, tetapi di bantasi oleh pertanggung jawaban secara horinzontal dan secara vertical sekaligus. Suatu kebebasan yang tak terkendali yang membuat sesuatu pasti tidak akan membawa dampak positif walaupun dalam jangka pendek mungkin mengutungkan demikina pula nilai kebenaran harus di junjung tinggi untuk mempertahankan suatu tujuan dari bisnis.²⁵ Kebebasan harus di imbangi dengan pertanggung jawaban manusia sebagaimana firmanya QS. Al-Muddatstsir [74] ayat 38.²⁶

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya :

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya

Dalam islam mempromosikan suatu produk melalui iklan, kebenaran dan kejujuran adalah dasar nilai etika bisnis islam. Islam sangat melarang kebohongan dalam berbagai bentuk. Maka dari itu setiap pemasar harus berlaku jujur, benar dan harus dalam melakukan promosi sesuai dengan iklan yang ditampilkan.

Indikator promosi dalam pengambilan kredit mengacu pada metrik atau faktor yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye promosi atau pemasaran yang ditujukan untuk menarik nasabah atau peminjam potensial dalam

²⁵ Muhammad, Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, (Yogyakarta, 2004). 274

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat An-Nisa*, CV. (Dipogoro, Bandung, 2000) . 576

mengajukan kredit. Tujuan utama promosi dalam pengambilan kredit adalah mendorong minat calon nasabah untuk memilih dan mengajukan kredit kepada lembaga keuangan. Beberapa indikator promosi dalam pengambilan kredit yang umum digunakan meliputi:

1. Jumlah Prospek atau Leads: Mengukur jumlah prospek atau calon nasabah yang tertarik dan mengajukan permohonan kredit setelah terkena promosi. Indikator ini mencerminkan tingkat minat dan respons terhadap kampanye promosi.
2. Konversi Prospek: Mengukur persentase prospek atau calon nasabah yang akhirnya mengajukan kredit setelah terkena promosi. Indikator ini menunjukkan efektivitas kampanye promosi dalam mengubah minat menjadi tindakan nyata.
3. Jumlah Aplikasi Kredit: Mengukur jumlah aplikasi kredit yang diterima sebagai hasil dari promosi. Indikator ini mencerminkan seberapa efektif promosi dalam mendorong calon nasabah untuk mengajukan kredit.
4. Rasio Persetujuan: Mengukur persentase aplikasi kredit yang akhirnya disetujui oleh lembaga keuangan. Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan promosi dalam menarik nasabah yang memenuhi kriteria persetujuan kredit.
5. Nilai Pinjaman: Mengukur jumlah total nilai pinjaman yang diberikan kepada nasabah sebagai hasil promosi. Indikator ini mencerminkan efektivitas promosi dalam mendorong nasabah untuk mengajukan pinjaman dengan jumlah yang diinginkan.

6. Tingkat Pertumbuhan Portofolio Kredit: Mengukur pertumbuhan portofolio kredit lembaga keuangan selama periode promosi. Indikator ini mencerminkan dampak promosi terhadap peningkatan jumlah pinjaman yang disetujui.
7. Tingkat Retensi Nasabah: Mengukur sejauh mana promosi berhasil mempertahankan nasabah yang sudah mengajukan kredit. Indikator ini mencerminkan tingkat kepuasan nasabah dan efektivitas upaya retensi setelah mengajukan kredit.
8. Tingkat ROI (Return on Investment): Mengukur sejauh mana promosi kredit memberikan pengembalian yang menguntungkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk promosi. Indikator ini melibatkan perbandingan antara pendapatan yang dihasilkan dari portofolio kredit dengan biaya promosi.

Pemilihan indikator promosi dalam pengambilan kredit yang tepat tergantung pada tujuan promosi, strategi pemasaran, dan karakteristik produk kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.

4. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

a. Pengetian LPMUKP

Lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan (LPMUKP) didirikan oleh kementerian kelautan dan perikanan (KKP) untuk dapat meningkatkan akses permodalan masyarakat kalautan dan perikanan. LPMUKP dibentuk pada tanggal 20 september 2009 melalui peraturan menteri kelautan dan

perikanan nomor PER.20/MEN/2009²⁷. Pendidikan LPMUKP di lakukan setelah dihentikannya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP)serta program dana pengutan modal perikanan budidaya (DPM-PB) pada tahun 2007. ²⁸

1. Tugas dan Fungsi LPMUKP

Sesuai pengaturan dalam pengelolaan keuangan negara, LPMUKP perlu ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Untuk mendukung hal tersebut, pada tanggal 20 September 2016 LPMUKP ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK BLU melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016. Melalui penetapan PPK BLU, diharapkan LPMUKP mampu menjalankan peran pemerintah sebagai salah satu solusi atas permasalahan permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Adanya alokasi dana kelolaan sektor kelautan dan perikanan yang dikelola oleh LPMUKP tentu menuntut hadirnya tata kelola organisasi yang baik serta perencanaanbisnis dan penganggaran yang matang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi seperti risiko operasional, hukum, kredit macet dan bermasalahserta risiko lainnya, di samping untuk memberikan pelayanan pinjaman atau pembiayaan yang optimal pada masyarakat kelautan dan perikanan. Seiring dengan perkembangan LPMUKP yang ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU, Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur

²⁷ Syarif . *LPMUKP di daerah pesisir*, (jakarata 2015)

²⁸ Ahmad Bahri, *lembaga pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan*, (Medan merdeka timur) . 16

Negara dan Reformasi Birokrasi, mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017, LPMUKP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.²⁹ Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPMUKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran(RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan LPMUKP;
- c. Pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;
- d. Pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan
- e. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan
- h. Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

b. Budaya Organisasi

LPMUKP menerapkan prinsip-prinsip yang senantiasa dijalankan dalam

²⁹ Tria Putri, *penyuluhan kementerian kelautan dan perikanan*. (Jakarta 2018)

melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menjadi budaya yang melekat pada setiap elemen LPMUKP. Hal ini bertujuan agar LPMUKP dapat mencapai kinerja terbaik dan memenuhi ekspektasi yang ada. Prinsip-prinsip dalam tata kelola LPMUKP adalah sebagai berikut:³⁰

c. Transparansi

LPMUKP menerapkan keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan atau kebijakan organisasi, keterbukaan dalam penyampaian informasi yang jelas, tepat waktu dan diperbandingkan menyangkut keadaan keuangan serta keterbukaan dalam pengelolaan yang relevan dengan organisasi.

d. Akuntabilitas

LPMUKP harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada LPMUKP dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas tidak hanya diterapkan dalam pelaksanaan program pelayanan publik namun juga meliputi akuntabilitas baik dari aspek kegiatan maupun aspek keuangan LPMUKP.

e. Responsibilitas

Pengelola organisasi LPMUKP harus senantiasa memiliki ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip organisasi yang sehat. LPMUKP juga menetapkan tugas dan kewenangan pengelola LPMUKP yang ada, baik melalui Tata Kelola LPMUKP maupun

³⁰ Syarif. *LPMUKP di daerah pesisir*, (jakarata 2015)

melalui penjabaran lebih lanjut dalam SOP, Juknis dan pengaturan lain yang ada. Seluruh elemen LPMUKP harus mampu mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

f. Independensi

Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan organisasi LPMUKP secara profesional tanpa benturan kepentingan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai etika dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Adanya prinsip ini memberikan kesadaran kepada seluruh pegawai LPMUKP tentang asas *prudent dan proper* dalam pelaksanaan tugas.

g. Integritas

Prinsip ini berisi komitmen yang tinggi dari LPMUKP untuk mencapai hasil terbaik untuk organisasi melalui pengelola organisasi yang jujur dan kompeten, percaya diri, dan memiliki loyalitas yang tinggi untuk melaksanakan program-program organisasi. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip kewajaran yang ditunjukkan dengan adanya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* LPMUKP yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator LPUMKP merujuk pada Laporan Pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPUMKP), yang merupakan laporan yang disusun oleh lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Laporan ini bertujuan untuk memantau dan melaporkan data mengenai kinerja pembiayaan yang diberikan kepada sektor UMKM.

Meskipun tidak ada indikator khusus yang secara resmi ditetapkan dalam LPUMKP, terdapat beberapa indikator umum yang sering digunakan untuk memonitor kinerja pembiayaan UMKM, termasuk:

1. Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan: Indikator ini mengukur jumlah total pembiayaan yang diberikan kepada UMKM selama periode tertentu. Hal ini mencerminkan tingkat aktifitas pembiayaan dan pengaruh lembaga keuangan terhadap sektor UMKM.
2. Jumlah UMKM yang Mendapatkan Pembiayaan: Indikator ini mengukur jumlah UMKM yang berhasil memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan sejauh mana lembaga keuangan memberikan akses pembiayaan kepada sektor UMKM.
3. Jumlah Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan: Indikator ini memperlihatkan komposisi pembiayaan berdasarkan jenis pembiayaan yang diberikan, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau pembiayaan mikro lainnya. Hal ini membantu dalam memahami preferensi UMKM dalam memanfaatkan pembiayaan yang ditawarkan.
4. Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan: Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan pembiayaan terhadap UMKM dari periode ke periode. Hal ini mencerminkan efektivitas lembaga keuangan dalam meningkatkan porsi pembiayaan terhadap sektor UMKM.
5. Tingkat Kredit Bermasalah (NPL): Indikator ini mengukur persentase pembiayaan UMKM yang mengalami tunggakan pembayaran atau berpotensi menjadi kredit bermasalah. Tingkat NPL memberikan

gambaran tentang kualitas kredit dan risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan.

6. Tingkat Kepuasan Nasabah: Indikator ini mengukur tingkat kepuasan nasabah UMKM terhadap layanan dan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan. Hal ini dapat diukur melalui survei kepuasan nasabah atau umpan balik yang diterima dari pelanggan.

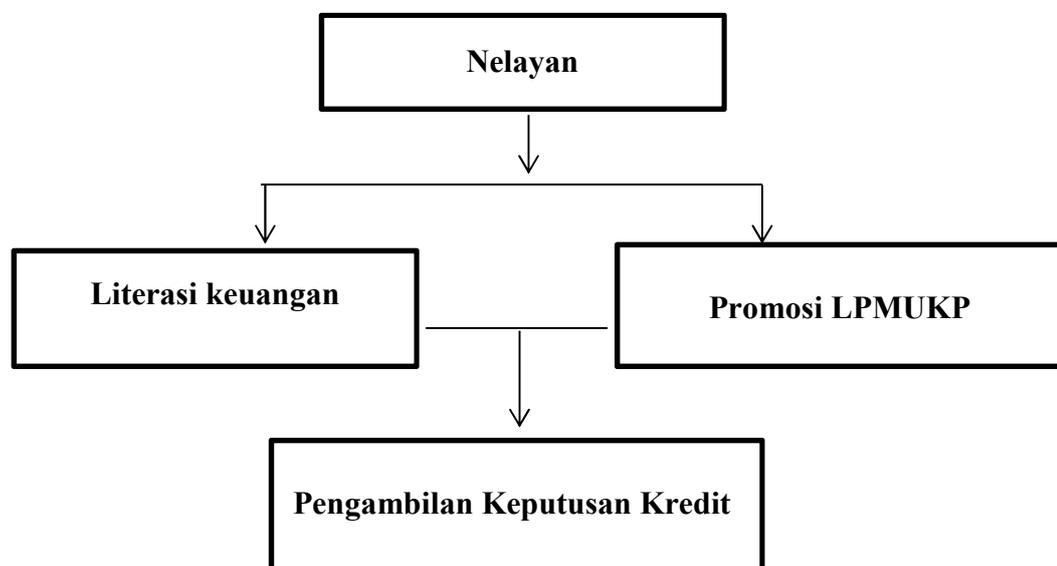
Pemilihan indikator LPUMKP akan bervariasi tergantung pada kebijakan lembaga keuangan, tujuan pemantauan, dan kebutuhan pelaporan yang spesifik.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikir adalah sebuah konsep penelitian yang dibuatkan berdasarkan pola fikir penelitian sendiri dengan maksud dapat mempermudah langkah penelitan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut³¹

Gambar 2.2

Kerangka pemikiran



³¹ Sugiyono, "metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D", (Bandung :penerbit Alfabeta,2015), 34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimaksud deskriptif adalah metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹

Menurut pendapat Donal Ari, et al yang di terjemakan oleh Arif Rahman mengemukakan bahwa “ metode penelitian adalah strategi umum yang di anut dalam pengumpulan data dan analisis yang di perlukan guna pemecahan bagi persoalan yang di hadapi”.²

Menurut Sugiono ada beberapa kelebihan yang terdapat dalam penggunaan pendekatan kualitatif yaitu:

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Pendekatan ini menyajikan hakekat hubungan antara penelitian dengan responden secara langsung.

¹ Koentjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, (Jakarta: Gramedia 56)

² Donal Ari, et al, *Introduction to Research*, diterjemakan oleh Arif Rahman, *pengantar penelitian dan pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional t.th.), h 50

3. Pendekatan ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan berbagai pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang di hadapi.³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

C. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini penulis adalah sebagai pengamat penuh. Kehadiran penulis sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang terjadi di parah masyarakat nelayan untuk penumpulan data. Adapun posisi peneliti dalam hal ini adalah sepengetahuan pihak-pihak tertentu, khususnya lokasi yang terkait dengan objek penelitian ini.

Kehadiran peneliti dimasukkan untuk memberikan gambaran mengenai kredibilitas peneliti selama melakukan penelitian karena salah satu ciri utama penelitian kualitatif yaitu menjadi instrument penelitiannya adalah manusia dengan tidak ada jarak antara peneliti dan yang diteliti sehingga akan diperoleh pemahaman penghayatan objek yang diteliti.

³ Imran Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (cet.III; malang : kalimasada press, 1996), h.40

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa hasil wawancara secara langsung kepada narasumber atau informasi yang di dapatkan di lapangan.

2. Data Skunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, sumber online, hasil penelitian berupa laporan dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. prosedur pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi :

1. Observasi

kegiatan dalam observasi ini melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana pada keadaan sebenarnya. fungsi observasi adalah agar peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. situasi yang rumit terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingka laku sekaligus. jadi observasi menjadi alat yang ampu untuk situasi yang rumit dan untuk perilaku yang kompleks.

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang di teliti. teknik observasi yang di

gunakan adalah observasi langsung sebagaimana di jelaskan oleh Winarno Surakhmad.”yaitu teknik pengumpulan data di mana penulis mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki,baik pengamatan yang di lakukan dalam situasi sebenarnya maupun pengamatan itu di lakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan “⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah sauatou cara pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.wawancara dilakukan langsung kepada pihak yang berhak meberikan data /informasi secara sestematis untuk memperoleh kejelasan mengenai data yang di peroleh di lapangan.dalam hal ini peneliti mewawancarai masyarakat di desa Panglasiang kecamatan sojol,Kabupaten Donggagala.

Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur sebagaimana diterangkan oleh Winarno Surakhmad.”Yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara.pewawancaralah sebagai pengemudi jawabannya responden”.⁵

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data.dalam teknik

⁴ Wanirno Surakhmad,*Dasar dan Teknik Research,Pengantar Metode Ilmiah*,Ed.VII Bandung Tarsito,1978),h.155

⁵ Suharsimi Arikontu,*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta : Rineka Cipta,2002),h.197

pengumpulan data ini penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi atau pun arsip penelitian yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian serta dalam teknik dokumentasi ini, penulis juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan di lokasi yang dimaksud. Adapun jenis dokumentasi yaitu, berupa foto lingkungan pesisir pantai, serta foto-foto wawancara penulis dengan narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu jenis analisis data yang digunakan, pengumpulan data yang telah ditentukan, kemudian dikelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Data-data yang didapatkan dari lokasi penelitian sangat penting untuk dicek kembali agar benar-benar memperoleh data-data yang akurat sesuai harapan. Adapun pengecekan keabsahan data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat dilakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau data tidak.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam hal ini data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.

3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

Menurut Denzim yang dikutip oleh Lexy.J Moleong “ Triangulasi di bedakan menjadi empat macam triangulasi dengan metode, triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode, triangulasi dengan penelitian, dan triangulasi dengan teori.⁶

Triangulasi dengan sumber, maksudnya membandingkan dan

⁶ *Ibid.*, h.116

mengecek balik,derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.Hal ini dapat di peroleh dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.triangulasi dengan metode,maksudnya pengecekan derajat kepercayaan melalui beberapa sumber data dengan metode yang sama.Triangulasi dengan penyidik,maksudnya memanfaatkan penulis atau pengamat yang lain,untuk membantu mengurangi kemencengan atau kekeliruan dalam pengumpulan data.Tringulasi dengan teori,maksudnya membandingkan suatu teori dengan teori yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum tentang lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan LPMUKP di Desa Pangalasiang

Setelah penulis mengadakan penelitaian tentang kredit lembaga pengelolah modal usaha keluatan dan perikanan (LPMUKP) di Desa pangalsiang kecamatan Sojol kabupaten donggala maka di bawa ini dapat di jalaskan tetntang hasil penelitian yang penulis lakukan.

1. Sejara Desa Panglasiang

Desa pangalasiang meupakan desa induk dan mempunyai 8 dusun yang terdiri dari 3 pulau,yang di mana masyarakat

2. Sejarah berdirinya lembaga pengalolah modal usaha kelautan dan perikanan (LPMUKP)

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa (termasuk dana bergulir) yang dijual tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. ¹Kemudian pengaturan terkait Badan Layanan Umum (BLU) tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lemabga, dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa

¹ Endraji Tunjung Seto, *Kepala Divisi Perencanaan dan Umum* 04/KEP-LPMUKP/II/2017

pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dilakukan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (Satker BLU). Atas dasar hal tersebut, dibentuklah satuan kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebagai BLU dengan rumpun pengelolaan dana bergulir di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LPMUKP ditetapkan menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum dengan status penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Kemudian pada Tahun 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan terkait struktur organisasi dan tata kelola BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Tugas dan fungsi utama BLU LPMUKP sesuai dengan PERMEN-KP Nomor 3 Tahun 2017 adalah melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang kemudian dilakukan melalui tiga skema penyaluran dana bergulir yaitu model penyaluran langsung kepada UMKM-KP yang diatur dalam Peraturan Direktur Nomor 4/PER-LPMUKP/2017, kemudian model penyaluran melalui LKM-KP yang diatur dalam Peraturan Direktur Nomor 3/PER-LPMUKP/2017 serta model

penyaluran melalui LKB/LKBB lainnya.²

BLU LPMUKP diberikan dana kelolaan pada Tahun 2019 sebesar Rp.500.000.000.000,00 yang kemudian dana kelolaan tersebut diberikan tambahan sebesar Rp.850.000.000.000,00 pada Tahun 2020, sehingga total dana kelolaan yang dimiliki oleh BLU LPMUKP adalah sebesar Rp.1.350.000.000.000,00. Sejak tahun pertamanya hingga akhir Desember 2021, dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir, LPMUKP telah menyalurkan pinjaman kepada masyarakat kelautan dan perikanan sebesar Rp.602.063.073.490,00 dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 17.461 jiwa untuk data pusat. Dengan adanya program penyaluran dana bergulir yang dikhususkan untuk masyarakat kelautan dan perikanan, diharapkan mampu untuk mendongkrak ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dengan membiayai pelaku usaha yang bersifat nonbankable yang diberikan pendampingan selama menjadi debitur LPMUKP hingga pelaku usaha atau kelompok usaha tersebut menjadi bankable.

Tingkat peningkatan pengambilan kredit oleh nelayan di Desa Pangalsiang melalui LPMUKP selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Dari data yang Anda berikan, terlihat bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah nelayan yang mengambil kredit dari LPMUKP setiap tahunnya. Tren pengambilan kredit seperti ini memiliki dampak yang positif pada perekonomian

² Hermawan Jatmiko *Kepala Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha* 04/KEP
LPMUKP/II/2017

desa, terutama dalam mendukung masyarakat nelayan. Dengan adanya akses keuangan yang lebih mudah melalui LPMUKP, para nelayan memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang mereka hadapi.

Kenaikan jumlah pengambilan kredit ini juga dapat berhubungan dengan promosi yang dilakukan oleh pihak pegawai atau LPMUKP itu sendiri. Semakin gencar promosi yang dilakukan, semakin banyak nelayan yang menyadari manfaat dari LPMUKP sebagai sumber pendanaan untuk usaha mereka. Selain itu, antusiasme masyarakat nelayan dalam mengambil kredit menunjukkan bahwa program ini sesuai dengan visi dan misi menteri kelautan, terutama dalam upaya menjadikan masyarakat nelayan lebih sejahtera dan berdaya. Pengembangan sektor perikanan dan peningkatan kualitas hidup nelayan menjadi tujuan yang dikejar, dan peningkatan jumlah penerima kredit menunjukkan progres dalam mencapai tujuan tersebut.

Namun, dalam menghadapi pertumbuhan pengambilan kredit yang pesat, penting untuk memastikan bahwa literasi keuangan nelayan juga meningkat. Dengan pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan, risiko, dan tanggung jawab dalam pengambilan kredit, para nelayan akan lebih siap dalam memanfaatkan dana yang diperoleh untuk keberlanjutan usaha mereka.

Sebagai kesimpulan, peningkatan pengambilan kredit oleh nelayan di Desa Pangalsiang melalui LPMUKP adalah indikator positif dalam mendukung visi misi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat nelayan. Namun, perlu

diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan agar manfaat dari kredit ini dapat dioptimalkan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

a. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2020 memiliki maksud sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BLU LPMUKP pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan/pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai bentuk pelaporan kinerja dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 2) Sebagai suatu wadah atau sarana untuk mengkomunikasikan/mempublikasikan capaian kinerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan selamasatu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

b. Tugas dan Fungsi LPMUKP

Sesuai pengaturan dalam pengelolaan keuangan negara, LPMUKP perlu ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (PPK BLU). Untuk mendukung hal tersebut, pada tanggal 20 September 2016 LPMUKP ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK BLU melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016. Melalui penetapan PPK BLU, diharapkan LPMUKP mampu menjalankan peran pemerintah sebagai salah satu solusi atas permasalahan permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

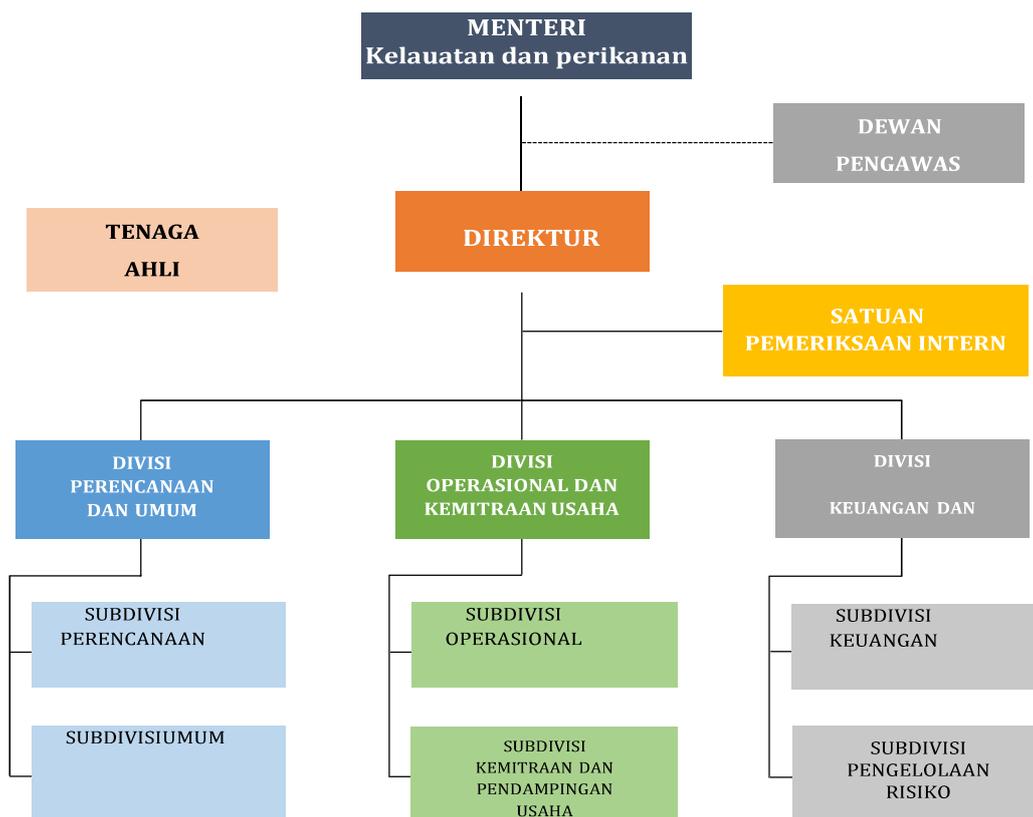
Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPUMKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran(RBA) tahunan, serta rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana kelolaan LPMUKP;
- c. Pelaksanaan penyaluran dana kelolaan;
- d. Pelaksanaan dan penyusunan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana kelolaan; dan
- h. Pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kehumasan, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

c. Sumber Daya Manusia LPMUKP

1. Organisasi BLU LPMUKP

Penetapan BLU LPMUKP sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditindaklanjuti dengan penetapan Struktur Organisasi BLU LPMUKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Adapun struktur organisasi BLU LPMUKP dapat dilihat pada **Gambar 1.1**³



Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPMUKP

³ Darmawan Sidik, *BLU LPMUKP sebagai Instansi Pemerintah* (Tahun 2020)

1. Direksi dan Manajemen BLU LPMUKP

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, susunan direksi dan manajemen BLU LPMUKP dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Susunan Pejabat Pengelola BLU LPMUKP

No	Nama	posisi	Nomor SK
1	Syarif Syahrrial	Direktur	KEP.05/MEN-KP/KP.430/XII/2019
2	Endraji Tunjung Seto	Kepala Divisi Perencanaan dan Umum	04/KEP-LPMUKP/II/2017
3	Hermawan Jatmiko	Kepala Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha	04/KEP-LPMUKP/II/2017
4	Kartika Rini	Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko	04/KEP-LPMUKP/II/2017
5	Darmawan Sidik	Kepala Satuan Pemeriksa Intern	02/KEP-PMUKP/I/2020
5	Salim	kemitraan dan pendapatan usaha	02/KEP-LPMUKP/I/2020

2. Visi dan Misi LPMUKP

a. Visi

Menjadi lembaga pengelola modal usaha produktif yang profesional, akuntabel dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

b. Misi

Dalam rangka mencapai tujuan ideal yang telah ditetapkan dalam visi tersebut, maka LPMUKP mempunyai misi:

- a. Mengimplementasikan tata kelola yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mengelola dana modal usaha kelautan dan perikanan secara akuntabel dan transparan;
- c. Meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan;
- d. Meningkatkan kerjasama strategis dengan pemangku kepentingan terkait pengaturan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelautan dan Perikanan.

a. Realisasi PNBPN Badan Layanan Umum

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang dikelola oleh BLU, yang berasal dari pendapatan

layanan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan, dan pendapatan non layanan yang diperoleh dari hasil optimalisasi/pemanfaatan surplus kas dan/atau dana kelolaan dalam investasi jangka pendek berisiko rendah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi PNBPN BLU dihitung untuk PNBPN yang disahkan ke Kuasa Bendahara Umum Negara.

b. Realisasi Pemanfaat Pinjaman Dana Bergulir LPMUKP

Realisasi pemanfaat pinjaman dana bergulir merupakan jumlah realisasi penerima dana bergulir dari BLU LPMUKP sesuai dengan daftar nominatif yang diajukan dalam proposal dan disetujui berdasarkan rapat pembahasan komite pinjaman.

c. Realisasi Penyaluran Dana Bergulir

Realisasi penyaluran dana bergulir adalah jumlah nilai rupiah atas dana kelolaan yang disalurkan sampai ke debitur (*end user*) selama tahun 2020 baik untuk penerima baru maupun penerima lama.

d. Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah perbandingan antara estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya (kurang lancar, diragukan dan macet) dengan *outstanding* Piutang Dana Bergulir untuk penyaluran pinjaman sejak tahun 2017 hingga tanggal 31

Desember 2020.

e. Persentase Realisasi Anggaran BLU LPMUKP

Persentase realisasi anggaran BLU LPMUKP merupakan persentase atas realisasi belanja anggaran yang dilakukan LPMUKP sepanjang Tahun Anggaran 2020.

f. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLU LPMUKP

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada periode 1 Oktober 2019 s.d. 30 September 2020 atau Triwulan IV Tahun 2019 s.d. Triwulan III Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

b. Peran Lembaga pengelola modal usaha dan perikanan (LPMUKP) Pada masyarakat nelayan di desa pangalasiang kecamatan sojol Kabupaten Donggala

Nelayan yang bekerja di sektor perikanan, terutama dalam menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Mereka beroperasi di perairan seperti laut, sungai, dan danau, menggunakan berbagai jenis peralatan seperti jaring, pancing, dan perahu untuk menangkap ikan dan binatang laut lainnya. Nelayan menjalankan kegiatan mereka secara tradisional atau modern, tergantung pada lokasi geografis dan tingkat teknologi yang tersedia. Aktivitas seorang nelayan meliputi persiapan

peralatan, pergi ke perairan, menangkap ikan, membawa hasil tangkapan ke darat, dan menjualnya di pasar ikan atau langsung ke konsumen. Kehidupan seorang nelayan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca, musim, perubahan iklim, dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menavigasi perairan, mengenali pola migrasi ikan, menggunakan peralatan penangkapan yang tepat, serta memahami praktik-praktik pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

1. Wawancara dengan Lembaga Perkreditan Mikro Usaha Kecil dan Menengah (LPMUKP)

Nelayan seringkali dihadapkan pada tantangan dan risiko, termasuk kecelakaan di laut, fluktuasi harga ikan, persaingan dengan nelayan lain, dan perubahan regulasi perikanan. Dalam hal ini terdapat peran utama Bantuan pinjaman kredit untuk para nelayan sebagaimana yang telah di nyatakan oleh salah satu pengurus LPMUKP sebagai berikut :

Peran utama LPMUKP adalah memberikan akses terhadap modal dan sumber daya keuangan kepada masyarakat nelayan. Kami berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pinjaman kepada nelayan untuk membiayai kegiatan usaha perikanan mereka, seperti pembelian peralatan, perbaikan kapal, atau modal kerja. Kami juga menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi nelayan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengelolaan usaha perikanan. Selain itu, kami membantu nelayan dalam akses ke pasar melalui kerjasama dengan pihak terkait.⁴

⁴ Salim S.Pr,pengawas Lembaga pengelolah modal usaha dan kelauatan tahun 2022

Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana promosi LPMUKP terhadap pengambilan keputusan kredit oleh para nelayan di desa pangalasiang, LPMUKP melakukan promosi kepada para nelayan di Desa Pangalasiang untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang layanan kredit yang ditawarkan sesuai dengan pernyataan dari pegawai promosi LPMUKP:

Kunjungan langsung: kami dari kepegawaian LPMUKP dapat melakukan kunjungan langsung ke Desa Pangalasiang untuk berinteraksi langsung dengan para nelayan. Dalam kunjungan ini, LPMUKP dapat memberikan informasi tentang program dan layanan yang mereka tawarkan serta manfaatnya bagi nelayan.⁵

LPMUKP telah memberikan dukungan kredit yang berharga bagi pengembangan masyarakat. Dana kredit yang diberikan oleh LPMUKP telah menjadi dorongan penting dalam mengembangkan usaha dan potensi ekonomi di desa kami. Melalui LPMUKP, masyarakat di Desa Pangalasiang telah memiliki akses ke dana kredit yang memungkinkan mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dana kredit tersebut telah digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membeli alat dan peralatan yang dibutuhkan dalam sektor pertanian, perikanan, atau kerajinan lokal. Sehingga dalam ini LPMUKP menyampaikan informasi tentang manfaat dan syarat-syarat kredit kepada para nelayan? Apakah ada pendekatan khusus yang digunakan sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara dari pegawai LPMUKP :

⁵ Salim, *pengawas lembaga pengolah modal usaha kealauatan dan perikana tahun2022*

Pertemuan komunitas: LPMUKP dapat mengadakan pertemuan komunitas khusus untuk para nelayan di Desa Pangalasiang. Dalam pertemuan ini, mereka dapat secara langsung menyampaikan informasi tentang manfaat dan syarat-syarat kredit yang ditawarkan. Dalam pertemuan ini, LPMUKP dapat menjelaskan secara rinci bagaimana kredit tersebut dapat membantu nelayan dalam usaha perikanan mereka, seperti pembiayaan alat tangkap baru atau perbaikan perahu. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi kepada para nelayan mengenai proses pengajuan kredit.⁶

Selain itu, masyarakat kami yang terampil dalam kerajinan tangan juga telah memanfaatkan kredit dari LPMUKP untuk membeli bahan baku dan alat kerja yang diperlukan dalam pembuatan produk kerajinan mereka. Ini membantu mereka meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pemasaran. Penting untuk dicatat bahwa LPMUKP tidak hanya memberikan dana kredit, tetapi juga memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat Desa Pangalasiang dalam mengelola usaha mereka. Ini termasuk pelatihan dalam manajemen keuangan, pemasaran, dan peningkatan keterampilan untuk mendukung keberhasilan usaha masyarakat.

Dengan adanya dukungan kredit dari LPMUKP, masyarakat di Desa Pangalasiang merasakan dampak positif yang signifikan dalam mengembangkan usaha mereka. Ini telah memberikan dorongan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kami. Desa Pangalasiang sangat berterima kasih atas dukungan kredit yang diberikan oleh LPMUKP dalam mendorong perkembangan ekonomi lokal kami. Kolaborasi antara LPMUKP dan masyarakat kami telah membawa dampak positif yang nyata, dan kami berharap kerjasama ini terus berlanjut untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan Desa Pangalasiang.

⁶ Salim, pengawas lembaga pengolah modal usaha kealauatan dan perikana tahun2022

Lembaga pengelola modal usaha kelauatan dan perikanan (LPMUKP) memberikan pelatihan atau pendidikan keuangan kepada para nelayan untuk membantu mereka memahami proses pengajuan kredit dan manfaatnya kedepannya sesuai dengan hasil wawancara tersebut :

LPMUKP dapat memberikan pelatihan atau pendidikan keuangan kepada para nelayan untuk membantu mereka memahami proses pengajuan kredit dan manfaatnya. Pelatihan atau pendidikan keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan nelayan sehingga mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan memahami bagaimana memanfaatkan kredit dengan bijak.⁷

Bagaimana LPMUKP mengukur efektivitas promosi mereka dalam mendorong para nelayan untuk mengambil keputusan kredit, sehingga ada indikator atau metrik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil promosi hal tersebut juga berkaitan dengan pernyataan dari pegawai LPMUKP:

Kami melihat dari Jumlah pengajuan kredit: LPMUKP dapat melacak jumlah pengajuan kredit yang diterima setelah periode promosi dilakukan. Jika terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengajuan, hal ini dapat menunjukkan bahwa promosi telah berhasil memotivasi para nelayan untuk mengambil langkah menuju pengajuan kredit.

Lembaga pengelolah modal usaha keluatan dan perikanan (LPMUKP) memiliki program insentif khusus, seperti suku bunga yang kompetitif atau penawaran khusus lainnya, untuk mendorong para nelayan mengambil kredit,hingga masyarakat bisa mengatasi sestem perkonomian meraka hal tersebut tadapat pernyataannya :

^{7 7} Salim, pengawas lembaga penglolah modal usaha kealauatan dan perikana tahun2022

Suku bunga yang kompetitif: LPMUKP dapat menawarkan suku bunga yang lebih rendah atau kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Suku bunga yang lebih rendah akan menjadi insentif bagi para nelayan untuk memilih kredit dari LPMUKP sebagai pilihan yang lebih menguntungkan.

Program insentif seperti ini dapat memberikan dorongan ekstra bagi nelayan untuk mengambil kredit dari LPMUKP. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada nelayan dalam pengelolaan usaha perikanan mereka, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap LPMUKP sebagai lembaga keuangan yang peduli dengan kebutuhan mereka. LPMUKP dapat memiliki rencana atau strategi jangka panjang yang bertujuan untuk memperluas akses dan meningkatkan partisipasi nelayan di Desa Pangalasiang dalam pengambilan keputusan kredit. Berikut beberapa contoh strategi yang dapat dilakukan sesuai dengan pernyataan pegawai LPMUKP:

Penjangkauan komunitas yang lebih luas: LPMUKP dapat mengembangkan upaya penjangkauan yang lebih luas untuk mencapai lebih banyak nelayan di Desa Pangalasiang. Ini bisa melibatkan kampanye promosi yang lebih intensif, partisipasi dalam acara komunitas, atau bekerja sama dengan organisasi lokal untuk mencapai lebih banyak nelayan. Dengan meningkatkan jangkauan, LPMUKP dapat mengedukasi lebih banyak nelayan tentang manfaat kredit dan memperluas partisipasi mereka.

2. Wawancara dengan masyarakat nelayan,Perkreditan Mikro Usaha Kecil dan Menengah (LPMUKP)

Masyarakat yang berada di desa pangalasiang kerap kali ekonomi menjadi permasalahan hambatan mereka Peran nelayan memenuhi kehidupan sehari-hari,sehingga berupaya dalam mengebangakan proses kerja merka dalam pengoprasian ikan.sebagai mana pernyataan yang di sampaikan oleh salah satu kepala keluarga sebagai berikut :

Upaya mengoptimalkan sestem perekonomian,yang menjadi kendalah utama buat saya sendiri,yaitu kekurangan alat tangkap ikan yang memadai. Saya hanya memiliki beberapa jaring pukat yang sudah tua dan rusak, dan pancing yang juga sudah usang. Alat tangkap yang kurang baik ini membuat saya sulit menangkap ikan dengan efektif.⁸

Sehubungan dengan pernyataan yang telah di ungkapkan salah satu nelayan Oleh Bapak Nurdin di desa Pangalasiang maka salah satu nelayan darai meraka pun juga berpendapat :

Saya berharap ada bantuan yang lebih terjangkau dan mudah diakses bagi nelayan seperti saya. Organisasi atau lembaga terkait dapat memberikan dukungan dalam bentuk pinjaman dengan suku bunga rendah atau program subsidi untuk memperoleh alat tangkap ikan yang lebih baik. Hal ini akan membantu kami meningkatkan hasil tangkapan dan meningkatkan kesejahteraan kami.⁹

Dalam hal ini terdapat bentuk bantuan lembaga penglolah modal usaha dan kelauatan (LPMUKP) dapat menggunakan beberapa bentuk penyaluran dana untuk mendukung pengambilan keputusan kredit oleh masyarakat nelayan. Ada

⁸ Nurdin, selaku nelayan di desa pangalasiang, "wawancara " .

⁹ Muis , selaku nelayan di desa pangalasiang, "wawancara " .

beberapa faktor yang melandasi masyarakat untuk berani mengambil kredit di lembaga LPMUKP, sesuai dengan hasil wawancara antara lain:

Kepercayaan terhadap lembaga: Jika LPMUKP telah membangun reputasi yang baik dan dapat dipercaya di masyarakat, ini akan menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat untuk mengambil kredit. Kepercayaan ini dapat terbentuk melalui pengalaman positif dari nelayan yang telah menggunakan layanan kredit LPMUKP sebelumnya, rekomendasi dari orang lain, atau reputasi yang baik dalam memberikan dukungan dan layanan kepada nelayan relevan.¹⁰

Untuk mempromosikan pengambilan keputusan kredit di masyarakat, LPMUKP dapat menggunakan beberapa strategi promosi yang efektif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan sesuai dengan pernyataan berikut :

Kampanye sosialisasi LPMUKP dapat mengadakan kampanye sosialisasi yang melibatkan berbagai media, seperti iklan di media cetak, radio, televisi, atau media sosial. Kampanye ini dapat memberikan informasi tentang program kredit yang ditawarkan oleh LPMUKP, persyaratan, manfaat, dan proses pengajuan kredit. LPMUKP juga dapat menggunakan brosur, pamflet, atau spanduk untuk menyebarkan informasi secara langsung kepada masyarakat.¹¹

Sehingga dalam hal ini terdapat Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengambilan kredit di LPMUKP. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pengambilan kredit di LPMUKP:

- a. Faktor-faktor yang mendukung pengambilan kredit di LPMUKP:

¹⁰ Salim, Staf Pelaksana program keuangan LPMUKP Tahun 2020

¹¹ Kurnia, Pegawai BLU Non PNS Profesional LPMUKP Tahun 2020

1. Reputasi dan Kredibilitas: Jika LPMUKP memiliki reputasi yang baik dan diakui sebagai lembaga pers yang profesional dan berkualitas, hal ini dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan kredit dari lembaga keuangan atau pihak lain yang tertarik untuk mendukung kegiatan jurnalistik dan pers mahasiswa.
2. Jaringan dan Koneksi: Jika LPMUKP memiliki jaringan yang kuat dengan lembaga keuangan, sponsor, atau donatur yang tertarik dengan bidang pers dan media, hal ini dapat memudahkan akses mereka ke sumber pendanaan, termasuk kredit.
3. Pendapatan dan Keuangan yang Stabil: Jika LPMUKP memiliki sumber pendapatan yang stabil, seperti iklan atau kerjasama dengan pihak luar, dan memiliki catatan keuangan yang baik, ini dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk mendapatkan kredit dengan bukti kemampuan membayar kembali.

b. Faktor-faktor yang menghambat pengambilan kredit di LPMUKP:

1. Ketidakstabilan Keuangan: Jika LPMUKP menghadapi ketidakstabilan keuangan, memiliki utang yang belum diselesaikan, atau memiliki catatan keuangan yang buruk, lembaga keuangan mungkin enggan memberikan kredit karena risiko pembayaran yang tinggi.
2. Kurangnya Agunan atau Jaminan: Jika LPMUKP tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan untuk kredit, seperti properti atau surat

berharga, hal ini dapat menghambat akses mereka ke kredit tradisional.

3. Kurangnya Dokumentasi dan Informasi Keuangan: Jika LPMUKP tidak memiliki dokumen keuangan yang lengkap dan terperinci, seperti laporan keuangan yang memadai, proses pengajuan kredit dapat terhambat karena kurangnya bukti tentang keuangan mereka.
4. Ketidaktahuan atau Kurangnya Pengalaman: Jika LPMUKP tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang memadai dalam mengajukan kredit, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami persyaratan, proses pengajuan, dan negosiasi dengan pihak kreditur.

Penting bagi LPMUKP untuk menjaga keteraturan keuangan, memiliki catatan keuangan yang akurat, serta menjalin kolaborasi yang baik dengan lembaga keuangan dan pihak terkait. Dengan memperkuat faktor-faktor pendukung dan mengatasi faktor-faktor penghambat, LPMUKP dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan kredit yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kegiatan penelitian mahasiswa. Dalam wawancara dengan seorang nelayan mengenai bagaimana masyarakat mengelola dana kredit dari LPMUKP hingga berkembang menjadi usaha nelayan, berikut adalah beberapa pernyataan yang dapat diutarakan dari salah satu nelayan yang menggunakan dana kredit dari LPMUKP:

kami sangat berterima kasih atas dukungan dana kredit yang diberikan oleh LPMUKP. Dana tersebut telah membantu kami dalam mengembangkan usaha nelayan kami."¹²

Hal senada pula yang di ungkapkan oleh salah satu Masyarakat nelayan yang menjadi nasaba kredit bahwa :

kami telah mengelola dana kredit dari LPMUKP dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Kami membentuk sebuah kelompok usaha nelayan di mana kami saling bekerja sama untuk mengelola dan memanfaatkan dana tersebut."

Kredit yang sangat membantu tersebut untuk para nelayan atau nasabanya kerana dapat mengembangkan usaha para nelayan di bidan kelautan meningkatkan perkonomian mereka hingga bisa mestabilkan kembali propses pencarian ikan sebagaimana juga di ungkapkan nelayan tersebut :

"Dana kredit dari LPMUKP telah kami gunakan untuk membeli peralatan nelayan yang lebih baik, seperti jaring, pancing, atau perahu motor. Ini telah meningkatkan produktivitas dan hasil tangkapan kami."Selain itu, kami juga menggunakan sebagian dana kredit untuk meningkatkan penanganan dan pengolahan hasil tangkapan kami. Kami membeli peralatan penyimpanan dan pendinginan yang memungkinkan kami menjaga kualitas ikan yang kami tangkap."¹³

Pernyataan-pernyataan tersebut mencerminkan pandangan nelayan mengenai pengelolaan dana kredit dari LPMUKP dan bagaimana dana tersebut telah membantu mereka dalam mengembangkan usaha nelayan di komunitas mereka.

¹² Ahmad.k. pengusaha jual beli hasil laut Desa panglasiang

¹³ Sumaman,nelayan di Desa Pangalsiang Kecamatan sojol

Tidak hanya melihat mengenai bentuk pengelolaan dana kredit, penulis juga melakukan wawancara dengan para nelayan mengenai literasi keuangan masyarakat, dalam proses pengelolaan dana LPMUKP. sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan, bahwa :

kami menyadari pentingnya literasi keuangan dalam mengelola dana yang kami terima dari LPMUKP. Kami telah belajar tentang pengelolaan keuangan, penganggaran, dan pentingnya membuat catatan yang akurat."¹⁴

Informan lain juga memberikan saran untuk mengatasi salah satu bentuk literasi yang ada, sebagai berikut :

Kami menghargai pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh LPMUKP atkan literasi keuangan kami. Kami telah mempelajari cara menghitung pendapatan, memperhatikan pengeluaran, dan mengelola utang dengan bijak."

"Melalui literasi keuangan, kami dapat memahami manfaat menabung dan merencanakan masa depan kami. Kami menyadari pentingnya membangun cadangan dana darurat dan berinvestasi dengan bijak untuk keberlanjutan usaha nelayan kami."

Berdasarkan paparan di atas maka penulis menyimpulkan Setelah melakukan wawancara dengan para nelayan yang mengambil kredit dari LPMUKP berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Dukungan Kredit: Kredit yang diberikan oleh LPMUKP telah menjadi sumber dukungan penting bagi para nelayan dalam mengembangkan usaha mereka. Dana kredit tersebut digunakan untuk membeli peralatan, alat

¹⁴ Dahlia, pengolah hasil laut di desa pangalasiang

tangkap, dan bahan baku yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan hasil tangkapan mereka.

2. Peningkatan Usaha: Dengan adanya kredit dari LPMUKP, para nelayan dapat mengembangkan usaha mereka dengan memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan kualitas produk, dan mengoptimalkan potensi hasil tangkapan mereka. Ini telah memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan para nelayan.
3. Literasi Keuangan: Melalui LPMUKP, para nelayan juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam literasi keuangan. Mereka belajar tentang pengelolaan keuangan, pemisahan dana pribadi dan usaha, serta manajemen utang. Hal ini membantu para nelayan dalam mengelola dana kredit dengan bijak dan memaksimalkan manfaatnya.
4. Kolaborasi dan Pembelajaran: Melalui LPMUKP, para nelayan juga terlibat dalam kolaborasi dan pembelajaran bersama. Mereka membentuk kelompok diskusi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tips dalam mengelola usaha dan keuangan mereka. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan kolektif.
5. Keberlanjutan Usaha: Dengan bantuan kredit dari LPMUKP dan peningkatan literasi keuangan, para nelayan memiliki kesempatan untuk menciptakan keberlanjutan usaha mereka. Mereka dapat mengembangkan strategi jangka panjang, seperti investasi yang cerdas dan perencanaan keuangan, untuk memastikan kelangsungan usaha mereka di masa depan.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis menyimpulkan dari pembahasan-pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya dan mengemukakan saran-saran positif mengenai kredit dalam neingkatkan perkenomian masyarakat di desa pangalasiang kecamatan sojol kabupaten donggala.

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab terdahulu dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) adalah badan layanan umum (BLU) yang dibentuk di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang, jasa, dan dana bergulir tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
2. LPMUKP didirikan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 710/KMK.05/2016 dan diatur oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.
3. Tugas utama LPMUKP adalah melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kelautan dan perikanan. LPMUKP menyediakan tiga skema penyaluran dana bergulir, yaitu melalui UMKM-KP, LKM-KP, dan LKB/LKBB lainnya.

4. LPMUKP memiliki dana kelolaan sebesar Rp 1.350.000.000.000,00 pada tahun 2018 dan telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 602.063.073.490,00 kepada masyarakat kelautan dan perikanan hingga akhir Desember 2020.
5. Laporan Kinerja LPMUKP Tahun 2020 disusun untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari laporan ini adalah sebagai bentuk pelaporan kinerja LPMUKP dan sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait.
6. Organisasi LPMUKP terdiri dari Direktorat dan divisi-divisi yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu. Terdapat juga pejabat pengelola teknis, pejabat pengelola keuangan, dan satuan pemeriksaan intern.
7. Target kinerja penyaluran LPMUKP pada tahun 2020 adalah mencapai alokasi dana bergulir sebesar Rp 725 miliar melalui mitra LKM, BPR, dan KUKP Madya dan Mandiri. Penyaluran dana bergulir diharapkan dapat memperkuat permodalan bagi koperasi/LKM dan UMKM serta menyerap tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan.

B. Saran dan Implikasi penelitian

Berikut adalah beberapa saran dan implikasi penelitian yang dapat dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan mengenai Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP):

Diharapkan bagi lembaga kreditan Lembaga pengelola modal usaha dan perikanan (LPMUKP) untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat mengenai LPMUKP akan lebih luas sehingga meningkatkan minat masyarakat khususnya di desa pangalasiang dalam melakukan kegiatan pelolaan dari krditan tersebut.

Iklan yotube kurang efektif sehingga diharapkan bagi dinas perikana dan keluatan untuk meningkatkan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan LPMUKP lebih luas seperti promosi melalui media elektronik, media sosial dan media cetak di Desa panglasiang agar masyarakat mengetahui LPMUKP sehingga akan mampu menarik minat masyarakat untuk melakukan pengabilan kreditan.

Harapan bagi LPMUKP untuk meningkatkan kualitas layanan dan literasi keuangan sehingga dapat menarik serta kompetitif sesuai dengan yang diinginkan masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Program Bantuan kredit LPMUKP.

DOKUMENTASI

**Gambar 1.1 Dokumentasi
Budidaya udang**



**Gambar 1.2 Dokumentasi
Usaha Budiya udang**



Gambar 1.3 Dokumentasi

Sosialisasi LPMUKP Di desa Pangalasiang



Gambar 1.4 Dokumentasi

Wawancara Nasaba pengambilan Kredit di LPMUKP



Gambar 1.5 Dokumentasi

Tali, Alat tangkap ikan



Gambar 1.6 Dokumentasi

Pambot sebagai fasilitas tangkap ikan



Gambar 1.7 Dokumentasi
Spanduk sosialisasi LPMUKP



Gambar 1.8 Dokumentasi
jaring ikan











KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

Nomor : ~~006/01~~LPMUKP/II/2021

Yth : Kepala Biro Perencanaan KKP
Dari : Direktur LPMUKP
Hal : Penyampaian Hasil Capaian Persentase Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP per 31 Desember 2020
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : 06 Januari 2021

Sehubungan telah dilakukannya pengukuran IKU Persentase Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP periode Triwulan IV Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Target Persentase Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP Tahun Anggaran 2020 adalah 95% dari target penyaluran dana bergulir sebesar Rp. 725 Miliar.
2. Hingga 31 Desember 2020, realisasi Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP mencapai Rp.295.891.013.490. Persentase capaian Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP terhadap target tahunan adalah sebesar 40,81%.
3. Tidak tercapainya target Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP disebabkan oleh beberapa hal berikut:
 - a. Kondisi pandemi *Covid-19* yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan penyaluran dana bergulir kepada masyarakat, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka menekan jumlah angka penyebaran *Covid-19*. Kebijakan tersebut berupa pembatasan sosial berskala besar, serta penerapan karantina mandiri yang memang dinilai berpengaruh terhadap aktivitas penyaluran dana bergulir, namun disamping itu LPMUKP juga perlu mengutamakan keselamatan pegawai dengan tetap mengikuti protokol kesehatan serta mengikuti aturan dan kebijakan yang diterapkan terkait penanganan pandemi *Covid-19*. Maka dari itu pencapaian target untuk IKU penyaluran dana bergulir pada Tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan secara Optimal dengan menggunakan metode seperti biasanya.
 - b. Pemenuhan kebutuhan pegawai BLU LPMUKP baru dapat dilaksanakan pada akhir Desember 2020, sehingga selama Tahun Anggaran 2020 LPMUKP tetap

melaksanakan kegiatan penyaluran dana bergulir dengan mengoptimalkan SDM yang tersedia, hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap intensitas kegiatan verifikasi kelayakan usaha yang dilaksanakan oleh Analis LPMUKP yang hanya berjumlah 2 Orang dan hanya dibantu oleh co analis. Kekurangan jumlah SDM tersebut juga merupakan penyebab tidak optimalnya kegiatan penyaluran dana bergulir LPMUKP pada Tahun Anggaran 2020.

4. Dari beberapa kendala tersebut LPMUKP telah melakukan upaya untuk mendorong pencapaian target IKU penyaluran dana bergulir melalui beberapa hal berikut;
 - a. Dalam rangka percepatan penyaluran dana bergulir, LPMUKP menyesuaikan proses bisnis dengan kondisi *new normal*, dimana rapat komite pembahasan kelayakan usulan pinjaman dana bergulir dilakukan secara tatap muka, kini telah disesuaikan dengan pembahasan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. Selain itu, beberapa pendamping yang telah mengikuti sertifikasi diberikan tugas tambahan untuk menilai kelayakan usaha calon debitur LPMUKP yang telah mengajukan proposal sebagai upaya dalam melaksanakan percepatan penyaluran dana bergulir kepada calon debitur LPMUKP.
 - c. Pemanfaatan Teknologi Informasi juga dioptimalkan dalam memproses proposal pinjaman dari calon debitur LPMUKP yang kini bisa dikirimkan oleh pendamping LPMUKP melalui aplikasi yang telah dikembangkan untuk menangani proposal penyaluran dana bergulir. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dapat menghemat waktu mengingat proposal dapat dikirimkan terlebih dahulu dengan mengirimkan *soft copy* yang kemudian nantinya disusul dengan pengiriman *hard copy*.
 - d. LPMUKP telah melaksanakan (*open recruitment*) sebagai upaya pemenuhan jumlah SDM yang dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Desember. Dengan adanya pemenuhan jumlah SDM tersebut, diharapkan LPMUKP kedepannya dapat lebih optimal dalam menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat.
5. Terlampir kami sampaikan data penyaluran dana bergulir LPMUKP Per 31 Desember 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.



Syarif Syahril

Tembusan:
Sekretaris Jenderal KKP

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

MEMORANDUM

Nomor: 3935/SJ.5/TU.210/x/2020

Yth. : Kepala Biro Perencanaan
Dari : Kepala Biro Keuangan
Perihal : Capaian IKU Rekapitulasi Temuan Itjen dan BPK
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 07 Oktober 2020

ini kami sampaikan Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setjen yang telah

ditindaklanjuti secara tuntas s.d. Triwulan III 2020, Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Setjen dibandingkan Realisasi Anggaran Setjen TA. 2019, dan Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Setjen.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Cipto Hadi Prayitno

Tembusan:

Sekretaris Jenderal KKP

Pedoman wawancara LPMUKP

Wawancara dengan Lembaga Perkreditan Mikro Usaha Kecil dan Menengah (LPMUKP) atau lembaga keuangan terkait dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mereka melakukan promosi untuk mendorong pengambilan keputusan kredit oleh para nelayan di Desa Pangalasiang. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat diajukan dalam wawancara:

1. Bagaimana LPMUKP melakukan promosi kepada para nelayan di Desa Pangalasiang untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang layanan kredit yang ditawarkan?
2. Bagaimana LPMUKP menyampaikan informasi tentang manfaat dan syarat-syarat kredit kepada para nelayan? Apakah ada pendekatan khusus yang digunakan?
3. Apakah LPMUKP memberikan pelatihan atau pendidikan keuangan kepada para nelayan untuk membantu mereka memahami proses pengajuan kredit dan manfaatnya?
4. Bagaimana LPMUKP mengukur efektivitas promosi mereka dalam mendorong para nelayan untuk mengambil keputusan kredit? Apakah ada indikator atau metrik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil promosi?
5. Apakah LPMUKP memiliki program insentif khusus, seperti suku bunga yang kompetitif atau penawaran khusus lainnya, untuk mendorong para nelayan mengambil kredit?

6. Apakah LPMUKP memiliki rencana atau strategi jangka panjang dalam memperluas akses dan meningkatkan partisipasi nelayan di Desa Pangalasiang dalam pengambilan keputusan kredit?

Pedoman wawancara untuk Nelayan

1. Bagaimana promosi LPMUKP terhadap pengambilan keputusan kredit di masyarakat ?
2. Hal apa yang melandasi masyarakat berani mengambil kredit di lembaga LPMUKP?
3. Bagaimana masyarakat mengelola dana kredit LPMUKP hingga berkembang menjadi usaha nelayan?
4. Bagaimana literasi keuangan masyarakat, dalam proses pengelolaan dana LPMUKP?
5. Apakah Anda sudah memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang layanan kredit yang ditawarkan oleh LPMUKP atau lembaga keuangan lainnya?